



MASTERPLAN SMART CITY

BUKU II

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN TAPIN



DISUSUN OLEH
TIM TEKNIS SMART CITY TAPIN

SAMBUTAN BUPATI TAPIN

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil alamin. Segala puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan hidayah Allah yang telah memberikan petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten Tapin berhasil menyelesaikan Buku II *Master Plan Smart City* Kabupaten Tapin Tahun 2022-2027.

Penyusunan Buku II *Master Plan Smart City* ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapin Menuju Kota Cerdas. Di dalam Buku II *Master Plan Smart City* memuat arah dan strategi pembangunan *Smart City*, rencana aksi dan peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Tapin. Visi *Smart City* berisi tujuan pelaksanaan *Smart City* yaitu Mewujudkan Kabupaten Tapin yang TAMPAN (TApin Maju, Profesional, Adaptif dan iNovatif) yang dijabarkan dalam Misi *Smart City* dan terinci jelas dalam rencana aksi dan peta jalan pembangunan *Smart City* Kabupaten Tapin untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Akhirnya Saya berharap Buku II *Master Plan Smart City* Kabupaten Tapin benar-benar dijadikan pedoman dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tapin menuju Kota yang Maju, Profesional, Adaptif dan Inovatif.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



BUPATI TAPIN

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM



DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI TAPIN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Kerangka Pikir <i>Smart City</i>	6
1. <i>Smart Governance</i>	7
2. <i>Smart Branding</i>	9
3. <i>Smart Economy</i>	10
4. <i>Smart Living</i>	12
5. <i>Smart Society</i>	13
6. <i>Smart Environment</i>	15
2. Arah Pembangunan <i>Smart City</i> Tapin	17
2.1. Visi, Misi dan Sasaran <i>Smart City</i> Tapin	17
2.1.1. Visi <i>Smart City</i> Tapin	17
2.1.2. Misi <i>Smart City</i> Tapin.....	18
2.1.3. Sasaran <i>Smart City</i> Tapin.....	18
1. <i>Smart Governance</i>	18
2. <i>Smart Branding</i>	19
3. <i>Smart Economy</i>	19
4. <i>Smart Living</i>	20
5. <i>Smart Society</i>	20
6. <i>Smart Environment</i>	21
2.2. Indikator Utama <i>Smart City</i> Tapin	21
1. <i>Smart Governance</i>	21
2. <i>Smart Branding</i>	24
3. <i>Smart Economy</i>	25
4. <i>Smart Living</i>	27
5. <i>Smart Society</i>	28
6. <i>Smart Environment</i>	30
3. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> Kabupaten Tapin.....	33



a. <i>Smart Governance</i>	33
b. <i>Smart Branding</i>	35
c. <i>Smart Economy</i>	37
d. <i>Smart Living</i>	39
e. <i>Smart Society</i>	40
f. <i>Smart Environment</i>	43
4. Rencana Aksi <i>Smart City</i> Tapin.....	45
a. <i>Smart Governance</i>	45
b. <i>Smart Branding</i>	53
c. <i>Smart Economy</i>	59
d. <i>Smart Living</i>	67
e. <i>Smart Society</i>	70
f. <i>Smart Environment</i>	78
5. Peta Jalan Pembangunan <i>Smart City</i> Tapin	84
1. Pembangunan Jangka Pendek	84
2. Pembangunan Jangka Menengah.....	103
3. Pembangunan Jangka Panjang	131
6. Penutup.....	160



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Smart City telah menjadi tren di seluruh penjuru dunia sebagai konsep untuk pembangunan daerah atau kota, begitu juga bagi pembangunan daerah atau kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tapin bercita-cita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pendekatan *Smart City*. Kabupaten Tapin terdorong untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan berbasis *Smart City*, maka terbukanya ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan berbagai teknologi sebagai alat bantu pengembangan daerah.

Pada saat yang sama, perubahan tren ini seharusnya tidak serta merta mengubah identitas Kabupaten Tapin yang telah lama terbentuk. Kabupaten Tapin dikenal juga dengan sebutan “Negeri Para Datu”, dikarenakan banyaknya makam-makam keramat yang menjadi aset luar biasa bagi Kabupaten Tapin, bukan hanya sebagai objek wisata religius akan tetapi juga menjadi identitas yang melekat pada Kabupaten Tapin. Terdapat beberapa hal lagi selain itu yang bisa menjadi identitas. Misalnya legenda “Balahindang” tentang kisah heroik dua naga, akan memunculkan Kabupaten Tapin sebagai kota Pelangi (Balahindang). Kabupaten Tapin juga punya makanan khas dari pisang, yaitu Rimpi yang bisa menjadikan Tapin sebagai kota Rimpi. Kabupaten Tapin juga dikenal memiliki cabai yang khas karena sangat pedas, yaitu cabe rawit Hiyung yang jika diproduksi dengan baik bahan jadi dalam kemasan maka Tapin bisa berjulukan kota cabai.

Secara geografis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43” - 30.00'.43” Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13”– 1150.30'.33” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas:

- Utara: Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Selatan: Kabupaten Banjar.
- Barat: Kabupaten Barito Kuala.
- Timur: Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Luas daerah Kabupaten Tapin adalah 2.174,95 km², sekitar 5,8% dari luas Kalimantan Selatan. Daerah dengan luas terbesar adalah Candi Laras Utara dengan luas 681,40 km² atau sebesar 31,33% dari luas keseluruhan Kabupaten Tapin, sementara daerah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas 32,34 km² atau sebesar 1,49% dari luas Kabupaten Tapin.



Wilayah Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu:

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Binuang | 5. Tapin Tengah | 9. Tapin Utara |
| 2. Hatungun | 6. Bungur | 10. Bakarangan |
| 3. Tapin Selatan | 7. Piani | 11. Candi Laras Selatan |
| 4. Salam Babaris | 8. Lokpaikat | 12. Candi Laras Utara |

Penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 189.475. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Tapin mengalami pertumbuhan sebesar 1,29%. Sementara itu rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2020 sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin tahun 2020 mencapai 88 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan sebesar 779 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Candi Laras Utara sebesar 28 jiwa/km².

Pada proses pembangunan *Smart City*, Kabupaten Tapin melakukan berbagai persiapan menuju ke arah kota pintar. Dilakukan analisis kesiapan *Smart City* Kabupaten Tapin guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas kota dalam menerapkan program-program pembangunan *Smart City*. Tiga komponen utama yang menjadi kajian yaitu kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. Analisis struktur kota dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan Kabupaten Tapin. Kesiapan infrastruktur di Kabupaten Tapin memberi gambaran dan ukuran kondisi sarana dan prasarana fisik yang menjadi titik tolak dalam pembangunan *Smart City* daerah. Suprastruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Tapin, kelembagaan dan tata laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Sistem pembangunan *Smart City* terdiri dari 6 (enam) dimensi, yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Dimensi-dimensi tersebut merupakan pendekatan terhadap tata kelola yang menysasar langsung isu-isu strategis dalam tatanan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Tapin, sehingga terwujud visi *Smart City* Kabupaten Tapin TAMPAN (Tapin Maju Profesional Adaptif dan Inovatif).



1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan *master plan* ini adalah untuk menyusun perencanaan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Tapin melalui pendekatan 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment* secara sistematis, efektif, efisien, logis, kondisional, partisipatif dan realistis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tapin dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga dapat mewujudkan kota yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tapin yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Secara teknis tujuan penyusunan *master plan Smart City* Kabupaten Tapin antara lain:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan *Smart City* dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
2. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *Smart City*.
3. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City*.
4. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3. Landasan Hukum

1. *Smart Governance*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) Kota/Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru.
- SNI ISO 37120:2018 tentang Pembangunan Perkotaan dan Masyarakat yang Berkelanjutan, Indikator-Indikator untuk Layanan Perkotaan dan Kualitas Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

2. *Smart Branding*

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
- SNI ISO 317122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator untuk kota cerdas.

3. *Smart Economy*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

4. *Smart Living*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



5. *Smart Society*

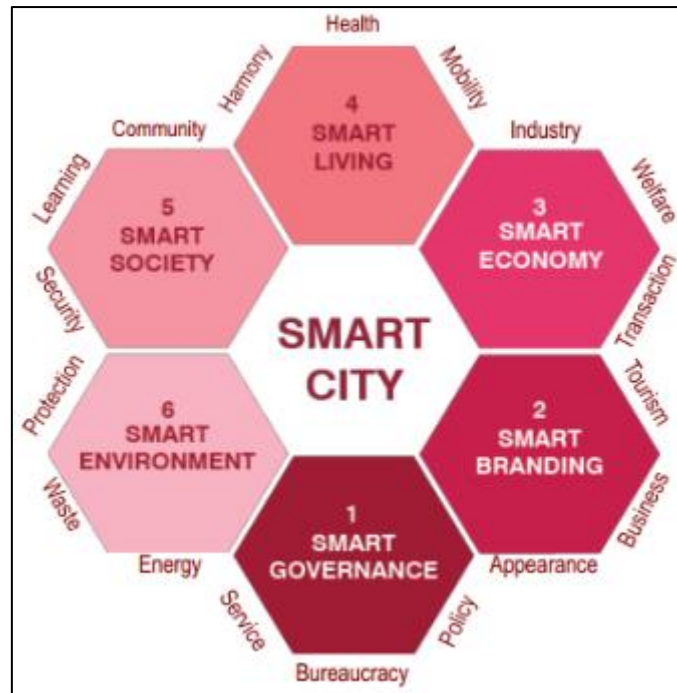
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2021, tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

6. *Smart Environment*

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 6 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Bupati Tapin Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kewajiban Menanam Pohon Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

Kota yang *Smart* merupakan sebuah cara untuk membentuk Kabupaten Tapin menjadi sebuah kota yang layak huni dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai agar mampu memberikan berbagai kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Tapin.



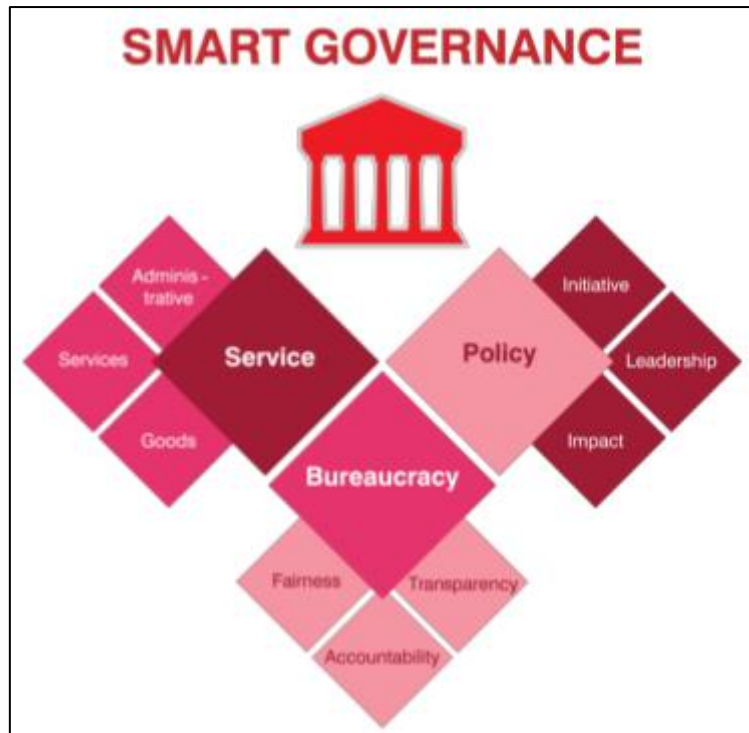
Gambar 1.1 Dimensi Smart City
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Dimensi pembangunan *Smart City* Kabupaten Tapin yaitu *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Masing-masing dimensi terdiri dari 3 (tiga) sub pilar dimensi.

1. *Smart Governance*

Smart Governance merupakan dimensi pembangunan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tapin yang dilaksanakan secara pintar, sehingga *Smart Governance* dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran pemerintahan yang memberikan layanan publik yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat, memantau pembangunan dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan. *Smart Governance* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Public Service*, yaitu meningkatkan layanan publik.
2. *Bureaucracy*, yaitu meningkatkan kinerja birokrasi.
3. *Public Policy*, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik.



Gambar 1.2 Sub Pilar Dimensi *Smart Governance*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Governance* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Pembangunan *Smart Governance*

Meningkatkan Pelayanan Publik (*Public Service*)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, *internet*, dan lain-lain.

Manajemen Birokrasi yang Efisien (*Bureaucracy*)

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan lain-lain. Pengembangan aplikasi *e-gov* harus diarahkan menuju *integrated* dan *interoperability e-gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi

dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah “*City Operation Center (COC)*”.

Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. *Smart Branding*

Smart Branding merupakan dimensi pembangunan *Smart City* yang fokus dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Tapin dan memasarkan potensi kota dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Pemasaran potensi Kabupaten Tapin ini diharapkan dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Branding* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Tourism*, yaitu membangun ekosistem pariwisata.
2. *Business*, yaitu membangun daya saing bisnis (industri kreatif).
3. *Appearance*, yaitu penataan wajah daerah.



Gambar 1.3 Sub Pilar Dimensi *Smart Branding*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Branding* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.2 Indikator pembangunan *Smart Branding*

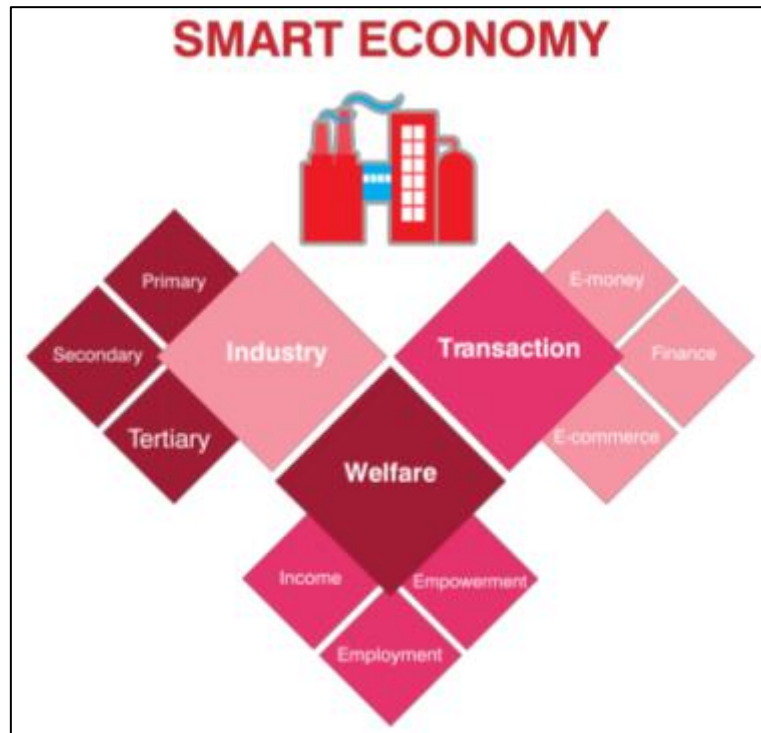
Mengembangkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>).- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (<i>amenities</i>) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/<i>bedding</i> dan <i>breakfast</i> (B&B), restoran, dan lain-lain.- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (<i>hospitality</i>) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan <i>tour guide</i> dan lain-lain.
Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Membangun <i>platform</i> dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya <i>marketplace</i> daerah.- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya <i>Investment Lounge</i>, <i>Dashboard</i>, dan Portal Investasi Daerah.- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, <i>digital</i>, dan lain-lain
Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>Appearance</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.- Membangun batas wilayah (<i>edge</i>), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (<i>landmark</i>), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (<i>signage</i>), struktur jalan yang teratur (<i>path</i>), dan titik simpul kota (<i>node</i>) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

3. *Smart Economy*

Smart Economy merupakan pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan dan adaptif terhadap perubahan sehingga terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Pada akhirnya diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat ditunjang secara efektif dan

efisien serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Smart Economy* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Industry*: yaitu penataan industri *primer, sekunder* dan *tersier*.
2. *Welfare*: yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. *Transaction*: yaitu membangun ekosistem keuangan.



Gambar 1.4 Sub Pilar Dimensi *Smart Economy*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Economy* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

Table 1.3 Indikator pembangunan *Smart Economy*

Membangun Ekosistem Industri Berdaya Saing (<i>Industry</i>)
Membangun daya saing industri daerah pada <i>leading sector</i> industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, <i>packaging</i> dan lain-lain) dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (<i>income</i>). - Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (<i>employment</i>).

- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

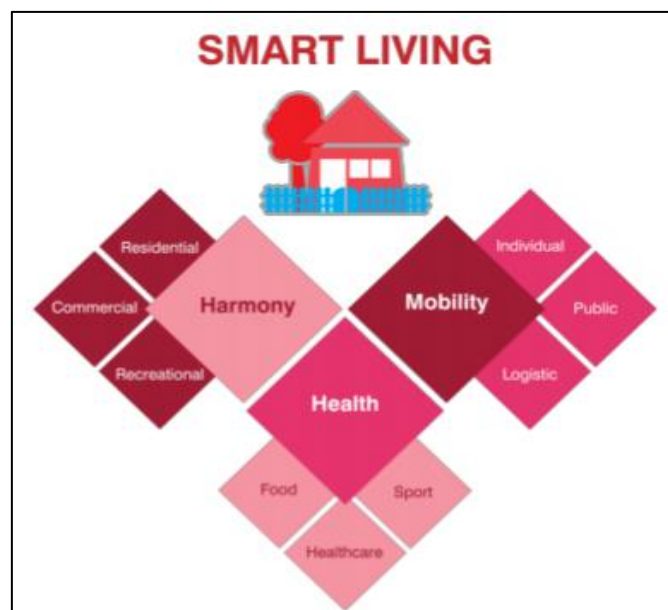
Membangun Ekosistem Transaksi Ekonomi (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*.
- Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan.
- Mewujudkan ekosistem ekonomi *digital* dengan mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace*.

4. *Smart Living*

Smart Living merupakan dimensi pembangunan tata kelola kelayakan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tapin sehingga mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak, nyaman dan efisien bagi masyarakat. *Smart Living* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Harmony*, yaitu harmonisasi tata ruang dan lingkungan yang nyaman.
2. *Health*, yaitu menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan.
3. *Mobility*, yaitu membangun sarana transportasi dan logistik.



Gambar 1.5 Sub Pilar Dimensi *Smart Living*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Living* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

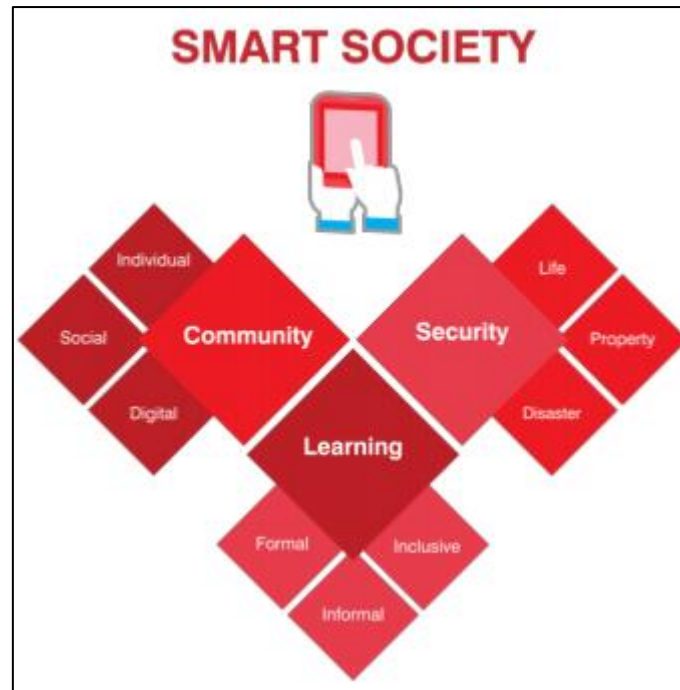
Tabel 1.4 Indikator pembangunan *Smart Living*

Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)
Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (<i>residential</i>), lingkungan pusat kegiatan bisnis (<i>commercial</i>) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (<i>recreational</i>).
Peningkatan Kualitas Layanan Sarana Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)
Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (<i>food</i>), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (<i>healthcare</i>), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>).
Pelayanan Fasilitas Transportasi Publik (<i>Mobility</i>)
Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (<i>mobility</i>) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

5. *Smart Society*

Smart Society merupakan dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik antar individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Interaksi masyarakat diharapkan terjalin intensif sehingga membentuk sebuah tatanan yang produktif secara positif dengan digital literasi yang baik. *Smart Society* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Community*, yaitu membangun masyarakat yang pintar.
2. *Learning*, yaitu membangun sistem edukasi yang efisien.
3. *Security*, yaitu menjamin keamanan dan keselamatan.



Gambar 1.6 Sub Pilar Dimensi *Smart Society*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Society* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5 Indikator pembangunan *Smart Society*

Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (<i>Community</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (<i>digital</i>) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan <i>Smart City</i> misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang <i>marketplace</i> dan lain-lain.
Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (<i>Learning</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang <i>disable</i>.

- Membangun *platform* edukasi bagi masyarakat misalnya: *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training* program dan lain-lain.

Meningkatkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.

6. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar. Di mana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujud tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. *Smart Environment* terdiri dari tiga (3) sub pilar berikut:

1. *Protection*, yaitu perlindungan lingkungan.
2. *Waste*, yaitu tata kelola sampah dan limbah.
3. *Energy*, yaitu membangun tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



Gambar 1.7 Sub Pilar Dimensi *Smart Environment*
Sumber: *Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)*

Program pembangunan *Smart Environment* di antaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 1.6 Indikator pembangunan *Smart Environment*

Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing</i> (IoT).- Membangun ruang terbuka hijau.- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.- Mengendalikan polusi udara.
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>).- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>).- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>).- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung jawab.
Mengembangkan Tata Kelola Energi yang Berkelanjutan (<i>Energy</i>)
<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab.- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

2. Arah Pembangunan *Smart City* Tapin

2.1. Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Tapin

2.1.1. Visi *Smart City* Tapin

Visi pengembangan *Smart City* di Kabupaten Tapin adalah:

“Tapin Maju, Profesional, Adaptif dan iNovatif”

“TAMPAN”

Visi *Smart City* Kabupaten Tapin dapat dijabarkan dalam 4 (empat) kata kunci penting yaitu **“Maju”**, **“Profesional”**, **“Adaptif”** dan **“iNovatif”** yang maknanya dapat dijabarkan arti dari kata-kata tersebut.

Tabel 2.1 Penjabaran visi *Smart City* Kabupaten Tapin

Maju	:	Memiliki pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
Profesional	:	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.
Adaptif	:	Menciptakan masyarakat yang peka dan siap terhadap tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai ciri khas dan identitas masyarakat Tapin yang berakhlak dan agamis.
iNovatif	:	Membangun masyarakat yang tak kenal lelah belajar berbagai ilmu yang mendorong peningkatan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cerdas, sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup yang mengarah pada kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan.

2.1.2. Misi *Smart City* Tapin

Agar pencapaian visi *Smart City* Kabupaten Tapin tersebut dapat diwujudkan, maka disusunlah 6 (enam) misi yang dapat mendukung pelaksanaannya yaitu:

Tabel 2.2 Misi *Smart City* Kabupaten Tapin

Misi <i>Smart City</i> Kabupaten Tapin		Dimensi
Misi 1	: Meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang inovatif, responsif, akuntabel dan berkelanjutan.	<i>Smart Governance</i>
Misi 2	: Meningkatkan layanan pendidikan, keamanan dan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat.	<i>Smart Branding</i>
Misi 3	: Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam bidang kesehatan, transportasi, olahraga serta perumahan dan permukiman yang nyaman.	<i>Smart Economy</i>
Misi 4	: Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan.	<i>Smart Living</i>
Misi 5	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan didukung perilaku yang adaptif.	<i>Smart Society</i>
Misi 6	: Meningkatkan daya saing daerah melalui pariwisata dan ekonomi kreatif, budaya daerah, tampilan wajah kota dan agroindustri.	<i>Smart Environment</i>

2.1.3. Sasaran *Smart City* Tapin

1. *Smart Governance*

- a. Meningkatnya layanan informasi dan perizinan.
- b. Tersedianya SOP Pelayanan Publik.
- c. Tercapainya Tapin bebas *Blank Spot*.
- d. Meningkatnya layanan terhadap informasi publik.
- e. Meningkatnya layanan data statistik sektoral.
- f. Meningkatnya monitoring dan evaluasi aplikasi layanan pemerintahan.
- g. Meningkatnya tata kelola informasi dan komunikasi publik.
- h. Tercapainya persentase naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.
- i. Meningkatnya persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti.
- j. Tercapainya pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat dan tepat.
- k. Meningkatnya penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.



- l. Meningkatnya persentase pemberitaan dan publikasi.
- m. Meningkatnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan.

2. Smart Branding

- a. Meningkatnya kawasan agrowisata Desa Hiyung di bidang pertanian dan budidaya ikan.
- b. Meningkatnya promosi dan pemasaran produk lokal, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui *platform e-commerce*.
- c. Meningkatnya pengembangan usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata.
- e. Meningkatnya pengembangan, perlindungan dan pelestarian unsur kebudayaan.
- f. Meningkatnya pengembangan pariwisata *modern* berbasis budaya dan kesenian daerah.
- g. Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama waktu kunjungan.
- h. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi kreatif Daerah.
- i. Meningkatnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Sertifikasi Halal bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
- j. Tercapainya *one product one village*.

3. Smart Economy

- a. Meningkatnya potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendukung terbentuknya kawasan strategis daerah.
- b. Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya ketersediannya bahan pangan berbahan dasar ikan.
- d. Meningkatnya persentase PDRB sektor pertanian.
- e. Tercapainya swasembada pangan.
- f. Meningkatnya kesempatan kerja.
- g. Meningkatnya kualitas angkatan kerja terlatih.
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- i. Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- j. Meningkatnya jumlah wajib pajak dan retribusi daerah.
- k. Meningkatnya pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah.



- l. Meningkatnya pelaporan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.

4. *Smart Living*

- a. Tersedianya parkir elektronik di setiap fasilitas layanan publik.
- b. Tersedianya ruang pengawasan *Traffic Management Control* (TMC) dan terpasangnya *Area Traffic Control System* (ATCS) di daerah yang rawan kecelakaan.
- c. Tersedianya sistem informasi untuk pengajuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- d. Tersedianya sistem informasi untuk pendaftaran layanan kesehatan.
- e. Meningkatnya komunitas pengembangan diri di setiap Kelurahan atau Desa.
- f. Tersedianya ruang terbuka hijau di setiap Kelurahan atau Desa.
- g. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi, olahraga dan kesehatan yang memenuhi standar.
- h. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- i. Meningkatnya kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas *On Time Performance*.
- j. Meningkatnya layanan kesehatan dalam penanganan gawat darurat.
- k. Adanya harmonisasi tata ruang wilayah dan meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
- l. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat.
- m. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan penghubung desa dan kecamatan.

5. *Smart Society*

- a. Meningkatnya peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di setiap Kelurahan dan Desa.
- b. Tersedianya akses *internet* di setiap Kelurahan atau Desa.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan adanya lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
- d. Meningkatnya kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).
- e. Meningkatnya literasi masyarakat.



- f. Meningkatnya bantuan sosial dan modal usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sosial dasar melalui Posyandu dan PKK.
- h. Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan.
- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- j. Meningkatnya minat baca masyarakat.
- k. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- l. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah.

6. *Smart Environment*

- a. Meningkatnya sistem pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik secara terpadu berbasis teknologi.
- b. Tersedianya sistem informasi bencana daerah.
- c. Tersedianya sistem tata kelola, perlindungan dan pelaporan sumber daya lingkungan pada tanah, air dan udara berbasis *Internet of Thing* (IoT).
- d. Menurunnya indeks risiko bencana.
- e. Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- f. Meningkatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan.
- g. Meningkatnya tata kelola persampahan.
- h. Tersedianya infrastruktur energi alternatif yang ramah lingkungan.
- i. Tercapai tata kelola energi yang berwawasan lingkungan.

2.2. Indikator Utama *Smart City* Tapin

1. *Smart Governance*

a. Pelayanan Publik

- Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP).
- Meningkatnya jumlah persentase perizinan yang diterbitkan.
- Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).



- Tercapainya persentase permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diselesaikan tepat waktu dan tingkat akurasi data perorangan pada Kartu Keluarga.
- Tercapainya persentase permohonan pindah/datang yang diselesaikan.
- Adanya pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.
- Tercapainya persentase permohonan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu.
- Tercapainya persentase *stakeholder* yang memanfaatkan data kependudukan.
- Meningkatnya jumlah inovasi pelayanan di bidang adminduk.
- Adanya administrasi kewilayahan dan tercapainya persentase antar wilayah yang saling terkoneksi.
- Tercapainya persentase jumlah sarana dan prasarana TIK.
- Tercapainya persentase SDM TIK yang bersertifikasi.
- Tercapainya persentase penggunaan aplikasi layanan secara elektronik.
- Tercapainya persentase jumlah *include* Sistem Data Terpadu.
- Tercapainya persentase monitoring opini dan aspirasi publik.
- Tercapainya persentase penyebarluasan informasi dan komunikasi melalui media massa.
- Tercapainya persentase layanan data statistik sektoral yang disajikan.
- Meningkatnya jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya pelayanan administrasi dan persuratan.
- Meningkatnya pelayanan publik yang terintegrasi tentang produk hukum.
- Meningkatnya pelayanan publik tentang informasi kegiatan DPRD.
- Meningkatnya pelayanan terhadap kinerja anggota DPRD, optimalisasi kerja dan pelayanan publik.
- Meningkatnya update data Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian.
- Tercapainya persentase ASN dengan capaian kinerja lebih 90%.
- Tercapainya indeks kualitas perencanaan.
- Tercapainya persentase dokumen PPD yang disusun tepat waktu dan sesuai standar.
- Tercapainya persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
- Tercapainya jumlah aturan/ketentuan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti.
- Meningkatnya jumlah SKPD dengan kinerja pelayanan berkategori baik.



- Meningkatnya jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan SAKIP.
- Tercapainya persentase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Tercapainya persentase Desa dengan administrasi terbaik.
- Tercapainya waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Birokrasi Pemerintah

- Tercapainya persentase dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang tersedia dan dapat diakses secara *online*.
- Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang dapat diakses secara *online*.
- Meningkatnya jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
- Tercapainya indeks kualitas perencanaan.
- Tercapainya persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti.
- Tercapainya nilai transparansi dan akuntabilitas.
- Meningkatnya jumlah SKPD yang telah di Anjab, ABK dan Evjab.
- Meningkatnya jumlah usulan rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati kelembagaan.
- Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- Tercapainya persentase Desa dengan pengelolaan keuangan dan aset Desa sesuai ketentuan.

c. Kebijakan Publik

- Meningkatnya persentase dan jumlah perusahaan yang memiliki izin dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Tercapainya target investasi daerah.
- Meningkatnya jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah.
- Tersusunnya agenda rapat DPRD mempersiapkan, menyelenggarakan dan mendokumentasikan kegiatan tepat waktu.
- Tersedianya kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada.



- Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku.
- Terciptanya keselarasan pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah pada RPJMD.
- Tercapainya persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti.

2. Smart Branding

a. Pariwisata

- Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang terdata dalam bidang peningkatan kawasan wisata di Kecamatan.
- Meningkatnya jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri.
- Adanya media sosial yang dikelola secara berkelanjutan.
- Adanya aplikasi promosi pariwisata berbasis *website*.
- Meningkatnya jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri.
- Terbentuknya tim kreatif promosi pariwisata.
- Meningkatnya jumlah konten *video* dan gambar yang disebarluaskan melalui media digital.
- Adanya dokumen kajian ekonomi kreatif.
- Meningkatnya jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran.
- Adanya aplikasi pemesanan *online* plaza kuliner dan usaha ekonomi kreatif
- Adanya aplikasi pemesanan tiket *online* untuk objek daya tarik unggulan, objek cagar budaya dan *event*.
- Meningkatnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan Kebudayaan.
- Adanya dokumen data objek pemajuan kebudayaan daerah.

b. Kemudahan Pelaksanaan Bisnis

- Meningkatnya jumlah pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau Jawa.
- Meningkatnya jumlah pelatihan peningkatan mutu melalui diversifikasi desain pada produk anyaman berbahan baku purun.



- Meningkatnya jumlah peningkatan produktivitas perajin melalui pelatihan teknis *finishing* pada produk industri kerajinan.
- Meningkatnya jumlah pelatihan teknis diversifikasi produk olahan pangan.
- Meningkatnya jumlah pelatihan teknis pencelupan kain sasirangan dengan bahan alami.
- Meningkatnya jumlah partisipasi Dekranasda pada pameran *Expo* dan festival tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- Meningkatnya jumlah kegiatan pengolahan Kaolin.
- Meningkatnya promosi dan informasi melalui *website* SIPIKAT dengan perpanjangan *hosting*.
- Meningkatnya jumlah pembuatan peta industri.
- Meningkatnya jumlah pembinaan UP2K.
- Meningkatnya jumlah pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru.
- Meningkatnya jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan daya saing koperasi, pengawasan internal dan peraturan perkoperasian bagi pengurus koperasi.

c. Wajah Kota

- Terbangunnya jalan pedestrian untuk pejalan kaki di kawasan Rantau Baru.
- Terbangunnya lintasan khusus sepeda di kawasan Kota Tapin.
- Terbangunnya infrastruktur berupa bangunan dan fasilitas publik untuk merubah wajah Kota Tapin.
- Adanya sistem informasi untuk memudahkan masyarakat melihat bangunan penting dan bangunan bersejarah secara daring.

3. Smart Economy

a. Industri Berdaya Saing

- Terciptanya sistem informasi pertanian yang terintegrasi.
- Tercapainya persentase pelanggan menggunakan aplikasi.
- Tercapainya persentase pelayanan tamu daerah yang terlayani dengan baik.
- Meningkatnya partisipasi pelaku usaha di kecamatan khususnya masyarakat pedesaan.



b. Kesejahteraan Masyarakat

- Meningkatkan jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan.
- Adanya peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan.
- Adanya cadangan pangan daerah dan masyarakat.
- Adanya informasi harga pangan dan neraca bahan makanan.
- Meningkatkan jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan.
- Adanya pemantauan stok, pasokan dan harga Pangan.
- Terciptanya pembangunan lumbung pangan masyarakat.
- Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar.
- Tersedianya pangan berbasis sumberdaya lokal.
- Tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun.
- Meningkatkan jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- Terciptanya aplikasi berbasis teknologi *Artificial Intelligence* (AI) pertanian (*Smart Farming*) berbasis *Android*.
- Meningkatkan kesempatan kerja.
- Meningkatkan informasi dan peluang kerja.
- Meningkatkan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja.
- Meningkatkan jumlah masyarakat pedesaan yang melek teknologi, *high digital* dan kreatif dalam mencari ide usaha yang unik.
- Menurunnya persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka.

c. Transaksi Keuangan

- Terlaksananya pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Tersedianya *database* pasar yang akurat.



- Tersedianya pembayaran retribusi pasar secara digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Tersedianya sarana distribusi perdagangan modern untuk kenyamanan serta memberikan kemudahan pedagang dan pembeli dalam melakukan transaksi.
- Tersedianya informasi data barang pokok dan penting yang akurat untuk pengendalian harga di tingkat kabupaten.
- Tersedianya sistem informasi manajemen yang dapat menunjang aktivitas kemetrologian.
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja baru yang mendapat pelatihan.
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pendidikan dan menjalani pelatihan tentang administrasi.
- Tercapainya persentase penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

4. Smart Living

a. Normalisasi Tata Ruang

- Tercapainya persentase Rumah Layak Huni.
- Tersedianya SK tentang penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan
- Tercapainya rasio Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani.
- Tercapainya persentase perumahan yang sudah dihibahkan.
- Tercapainya persentase fasilitas umum perumahan yang sudah diperbaiki.

b. Sarana Prasarana Kesehatan

- Tersedianya sarana keolahragaan yang memenuhi Standar dan meningkatnya prestasi olahraga.
- Meningkatnya penanganan pasien atau korban kegawatdaruratan secara optimal.
- Menurunnya angka kematian dan kecacatan akibat kegawatdaruratan.
- Adanya kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam penanganan kegawatdaruratan (Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, *Team Rescue* Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit atau Tempat Rujukan).



c. Sarana Prasarana Transportasi

- Terpenuhi sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai Standar.
- Terpenuhi pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas *on time performance* (baik untuk pengamanan maupun pengawasan angkutan jalan).
- Berkurangnya tingkat kecelakaan lalu lintas darat dan sungai.
- Terpenuhi moda transportasi yang sesuai standar/layak jalan serta terkoneksi.

5. Smart Society

a. Interaksi Masyarakat yang Efisien

- Tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B.
- Tercapainya Angka Melanjutkan Sekolah SD/Paket A dan Angka Melanjutkan Sekolah SMP/Paket B.
- Tercapainya rasio guru terhadap siswa (TK/SD/SMP).
- Tercapainya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri.
- Tercapainya persentase Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Tercapainya persentase PKK aktif dan Posyandu aktif.
- Tercapainya persentase Desa yang melaksanakan administrasi pemerintah Desa sesuai standar dengan dokumen perencanaan yang konsisten.
- Tercapainya persentase Kelompok Binaan KKBPK yang menindaklanjuti hasil kegiatan.
- Tercapainya persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB.
- Tercapainya persentase peningkatan kepesertaan Ber-KB (CPR).
- Tercapainya rasio jumlah anak dari Pasangan Usia Subur (PUS).
- Adanya jumlah warga masyarakat yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- Tercapainya waktu pelaksanaan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan.



- Adanya jumlah peserta yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak.
- Tercapainya waktu pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga.
- Tercapainya jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga.
- Tercapainya jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia peningkatan kualitas keluarga.
- Tercapainya persentase gugus tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA.
- Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan.
- Tercapainya persentase pemustaka (pengunjung perpustakaan).
- Tercapainya persentase perpustakaan yang dapat diakses pemustaka.
- Tercapainya angka rata-rata pemanfaatan Perpustakaan.
- Terdaftar nya organisasi masyarakat secara legal.
- Terbukanya informasi kepada masyarakat baik informasi pelayanan untuk masyarakat yang berkaitan dengan politik, ormas, sosial, budaya, dan agama.
- Tercapainya persentase usulan masyarakat (RKP Desa) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan.

b. Ekosistem Belajar

- Tercapainya persentase PAUD dan PNF dengan akreditasi minimal B.
- Tercapainya rata-rata nilai Ujian Pendidikan Karakter (UPK) PNF.
- Tercapainya persentase lulusan Paket C yang tertampung dalam dunia kerja.
- Tercapainya persentase SD dan SMP dengan Akreditasi Minimal B.
- Tercapainya rata-rata nilai ujian SD dan SMP.
- Tercapainya persentase pendidik yang bersertifikasi.
- Tercapainya jumlah SKPD yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PPRG.
- Tercapainya jumlah peserta yang memahami sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- Tercapainya persentase forum anak daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan.
- Adanya seleksi, pembinaan dan pembekalan forum anak.



- Tercapainya persentase peningkatan tenaga pengelola perpustakaan yang terampil.
- Tercapainya persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan.
- Adanya sistem informasi data kesejahteraan rakyat.

c. Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

- Adanya kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana.
- Tercapainya persentase puskesmas ramah anak yang dikembangkan.
- Tercapainya persentase sekolah ramah anak yang dikembangkan.
- Adanya pelatihan KHA tenaga pendidik dan advokasi SRA.
- Adanya sosialisasi forum pendidikan pengasuhan budaya dan sekolah ramah anak.
- Tercapainya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Tercapainya persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK.
- Tercapainya persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK.
- Tercapainya persentase pengelola arsip yang terampil.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan politik, hubungan harmonis antar masyarakat, dan pembentukan ormas untuk menampung segala aspirasi/pendapat dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat.

6. Smart Environment

a. Proteksi Lingkungan

- Tercapainya persentase Desa Tangguh Bencana.
- Tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- Tercapainya persentase kesesuaian ruang.
- Tercapainya persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan.
- Tercapainya persentase rekomendasi dokumen Lingkungan yang ditindaklanjuti.
- Terbentuknya 10 Desa dan 10 Sekolah tangguh dan aman bencana.
- Adanya pelayanan bencana kebakaran.



- Tercapainya tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- Terpenuhinya 100% RTH aktif ramah anak bersertifikasi.
- Tercapainya indeks kualitas air dan udara pada tingkat baik.
- Tercapainya 20% RTH Publik.
- Tercapainya jumlah Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- Adanya sensor tinggi air untuk daerah rawan banjir
- Adanya sistem informasi dan digitalisasi peta rawan bencana
- Adanya proteksi lingkungan dengan penghijauan, monitoring kebersihan dan keindahan.
- Tercapainya persentase jumlah pelaku usaha yang mempunyai izin lingkungan melaporkan persyaratan teknis maupun administrasi.
- Adanya jumlah layanan sampah dan air limbah domestik yang diakses secara online.
- Tersedianya *tracking* kendaraan pengangkut sampah berbasis GIS.
- Tercapainya persentase pembayaran retribusi persampahan secara online.
- Adanya pemantauan Luas Ruang Terbuka Hijau berbasis GPS.
- Terbentuknya Forum Hijau Pembentukan dan Pembinaan Komunitas sekitar RTH dan pecinta lingkungan.
- Adanya pengawasan lingkungan TPA melalui CCTV.

b. Pengelolaan Sampah dan Limbah

- Tercapainya pengurangan sampah 30% hingga tahun 2027.
- Tercapainya cakupan pelayanan sampah 100%.
- Tercapainya layanan pengaduan 100% yang ditindaklanjuti.
- Tercapainya program pengembangan kinerja pengelolaan dan monitoring persampahan.
- Berkembangnya pengelolaan persampahan rumah tangga, industri dan publik yang terpadu berbasis teknologi.
- Berkembangnya sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Tercapainya persentase sampah yang ditangani, Jumlah bank sampah yang terdaftar.
- Adanya layanan jemputan sampah organik.
- Adanya pemanfaatan gas Metan di Tempat Pembuangan Akhir.



- Adanya sistem informasi *Bank Sampah*.
- Adanya monitoring mobilisasi pengangkutan sampah dengan GPS.
- Adanya layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT 3).
- Meningkatnya penanganan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

c. Tata Kelola Energi

- Adanya kegiatan, penelitian dan pengembangan energi terbarukan.
- Adanya pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.
- Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RT/RW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan.
- Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat.
- Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam bauran energi.
- Adanya pendataan konsumsi listrik per kapita.
- Tercapainya rasio ketersediaan daya listrik.
- Meningkatnya aksesibilitas energi.
- Meningkatnya efisiensi penggunaan energi.
- Adanya pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.
- Adanya program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.
- Adanya data rumah tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi).
- Tercapainya persentase rumah tangga berakses listrik.
- Tercapainya jumlah rumah tangga yang menikmati listrik.
- Adanya bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi.
- Adanya penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan.



3. Strategi Pembangunan *Smart City* Kabupaten Tapin

a. *Smart Governance*

1) Pelayanan Publik

- Mengembangkan sistem perizinan yang terintegrasi dan *interoperable*.
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, sarana dan prasarana serta pengembangan sistem perizinan *online*.
- Memberikan kemudahan dan peningkatan layanan melalui pembentukan Mal Pelayanan Publik.
- Meningkatkan kerjasama dan integrasi *database* penduduk terpadu antara sesama instansi pelayanan publik lain berbasis GIS.
- Menambahkan media informasi mengenai administrasi kependudukan yang mudah di akses masyarakat.
- Menambahkan petugas registrasi/UPT/KIOS dukcapil yang sampai di tingkat RT untuk melayani pengurusan dokumen kependudukan.
- Meningkatkan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan dengan integrasi layanan *online*, *digital signature* dan *survey* kepuasan publik.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.
- Meningkatkan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan.
- Meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat serta penambahan petugas *register* desa.
- Mewujudkan seluruh Tapin bebas *Blank Spot* di Tahun 2023.
- Memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas Infrastruktur TIK dan kemampuan SDM.
- Menerapkan *e-government*.
- Menyediakan pusat data pemerintah.
- Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Mengembangkan Aplikasi SIPAS.
- membuat dan mengembangkan *website* JDIH dan *website* DPRD.
- Membuat dan mengembangkan aplikasi e-rapat DPRD berbasis *android*.
- Mengadakan pelatihan tentang tata cara penggunaan aplikasi secara maksimal.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- Memenuhi kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran.
- Meningkatkan kualitas pelaporan, kinerja dan keuangan.



- Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil kelitbangan.
- Membangun komunikasi yang aktif antara pimpinan dan masyarakat melalui berbagai informasi publik melalui *website*.
- Meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih maksimal melalui media cetak dan elektronik.
- Mendorong pelayanan terpadu berbasis NIK.
- Mendorong pengembangan aplikasi pengumpulan *survey* kepuasan masyarakat secara *realtime* sebagai bahan pengambilan kebijakan dan monitoring evaluasi.
- Melakukan internalisasi *core values* ASN BerAKHLAK.
- Membuat dan menetapkan SOP dalam pelayanan publik.
- Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
- Meningkatkan kualitas ASN dalam pelayanan publik.

2) Birokrasi Pemerintah

- Membuat kebijakan/peraturan daerah tentang kemudahan dalam investasi dan perizinan.
- Menetapkan rencana umum pengembangan investasi daerah serta bisa diakses secara *online*.
- Memberikan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan serta bisa diakses secara *online*.
- Melaksanakan publik *hearing*/jaring asmara.
- Mengembangkan manajemen sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- Melakukan pemetaan batas Kabupaten dan batas Kelurahan, penyusunan laporan LKPJ, LPPD dan SPM.
- Mendorong pengintegrasian seluruh aplikasi penyelenggaraan pemerintahan.
- Mendorong pengembangan sistem administrasi yang transaksional.
- Meningkatkan pemahaman SAKIP bagi aparatur pemerintah.
- Menata ulang kelembagaan dengan penyederhanaan birokrasi.



- Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, mencakup SDM, proses kerja (SOP), infrastruktur, serta penggunaan TI.
- Melaksanakan pembinaan terhadap aparaturnya Desa.
- Meningkatkan kualitas dan pengembangan instrumen yang lebih baik untuk memandu kebutuhan, perumusan *stakeholder* dan meningkatkan realisasi usulan.

3) Kebijakan Publik

- Membentuk Mal Pelayanan Publik.
- Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara perizinan dan pelaku usaha melalui bimtek dan pelatihan.
- Meningkatkan jumlah investasi melalui promosi dan koordinasi dengan *stakeholder* dan pihak terkait.
- Menghimpun aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung, melalui *website* DPRD dan melalui kegiatan reses.
- Menyelaraskan dan melakukan rekapitulasi pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.
- Melakukan penerbitan regulasi berbasis TIK.
- Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data hasil kelitbangan.
- Pelaksanaan *survey* terhadap pengguna dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- Mempublikasikan informasi dan kegiatan pemerintahan yang akan ditayangkan.
- Melakukan kerjasama pemberitaan dan publikasi dengan pihak ke 3.
- Melakukan kerjasama percetakan baliho dengan pihak ke 3.

b. Smart Branding

1) Pariwisata

- Membuat akun media sosial, aplikasi promosi pariwisata dan pemasangan iklan *online*.
- Membentuk tim kreatif promosi pariwisata.
- Membuat konten *video* dan gambar.
- Melaksanakan bimtek peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
- Membuat dokumen kajian ekonomi kreatif.



- Membuat aplikasi pemesanan *online* Plaza Kuliner dan usaha ekonomi kreatif.
- Membuat aplikasi pemesanan tiket *online* untuk daya tarik wisata unggulan.
- Mendata dan menyusun data objek pemajuan kebudayaan daerah.
- Digitalisasi data objek pemajuan kebudayaan.
- Membuat aplikasi pemesanan tiket *online* fasilitas dan *event* budaya.
- Menyusun buku sejarah, tokoh dan kota/tempat.
- Membuat gedung kesenian.
- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan infrastruktur penunjang melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Membuat dan melaksanakan program pemasaran pariwisata.
- Melaksanakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
- Melaksanakan program pengembangan kebudayaan.

2) Kemudahan Pelaksanaan Bisnis

- Memfasilitasi pelaku industri dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk pemasaran hasil usaha industri kecil menengah di sekitar kawasan wisata.
- Memasarkan *brand* lokal pada *event* lokal, nasional dan internasional.
- Memfasilitasi pelaku usaha di daerah dengan *unicorn* besar di Indonesia dalam rangka digitalisasi pemasaran produk-produk industri daerah.
- Meningkatkan wajib penggunaan produk lokal di hari tertentu yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati.
- Membuat kebijakan dan pemetaan *One Product One Village*.
- Menggunakan teknologi mesin untuk pengolahan bahan baku agroindustri.
- Memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi seluruh Industri Kecil Menengah (IKM).
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang produktif, melek teknologi, dan berdaya saing.
- Menggunakan *e-Wallet* dalam transaksi keuangan unit simpan pinjam koperasi.
- Membentuk pusat bisnis daerah.
- membuat *e-Marketplace*.
- Membentuk klinik bisnis di setiap Kecamatan.



- Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif Desa (BUMDES) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- Memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Membantu mengembangkan pelaku usaha UMKM dengan difasilitasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- Peningkatan penetrasi brand produk lokal unggulan.
- Mengembangkan kawasan wisata kuliner yang nyaman dan aman bagi masyarakat.
- Meningkatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri dan data kawasan industri.
- Meningkatkan daya saing koperasi.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kompetensi SDM koperasi.
- Meningkatkan pengawasan terhadap koperasi.
- Membangun dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat menuju era digitalisasi.

3) Wajah Kota

- Mewujudkan Kota Tapin yang aman dan nyaman dengan ketersediaan informasi di ruang Publik.
- Menyediakan ketersediaan layanan ruang terbuka Publik yang berbasis TIK dengan menyediakan jaringan *internet/wifi*.
- Membuat plang informasi suhu dan kualitas udara di semua fasilitas umum.
- Membuat aplikasi *Tour Guide* khusus pemancing untuk menentukan lokasi pemancingan.
- Mengembangkan sistem *Area Traffic Control System (ATCS)* yang terkoneksi ke pusat kendali (*Control Room*).
- Menggalakkan kegiatan penghijauan.
- Membangun *landmark* khas Tapin.

c. Smart Economy

1) Industri Berdaya Saing

- Meningkatkan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.



- Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta pengolahan berbahan dasar ikan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap *illegal fishing*.
- Memperbanyak pelatihan, bimtek dan penyuluhan serta pemberdayaan kepada para masyarakat mengenai produk yang sedang viral dan berkembang di masyarakat dan mampu berdaya saing sesuai potensi yang dimiliki oleh desa.

2) Kesejahteraan Masyarakat

- Meningkatkan ketersediaan pangan utama dengan mutu dan jumlah yang cukup.
- Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat.
- Melakukan penanganan kerawanan pangan daerah.
- Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan daerah.
- Mengelola keseimbangan cadangan pangan daerah.
- Menyediakan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- Melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- Melakukan kegiatan penyediaan dan pemantauan informasi stok, harga pangan dan neraca bahan makanan.
- Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah.
- Menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar.
- Menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal.
- Menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan per kapita per tahun.
- Memberdayakan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- Merencanakan dan melakukan hilirisasi seluruh potensi produk unggulan pertanian dengan memberikan peningkatan nilai produk dan pasar dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal serta sistem informasi yang bermuara pada pembangunan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani.
- Mengembangkan pelayanan bursa kerja *online*.
- Membuat rumah layanan kerja untuk menghubungkan pencari kerja dengan pihak penerima kerja.



- Mengembangkan *soft skill* pencari kerja menjadi wirausaha (pelatihan konten kreator, barista dan fotografi).
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait untuk menjamin keterjangkauan harga barang, stabilitas pasokan barang, kelancaran distribusi dan jasa.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki kualitas data terkait pengendalian inflasi.

3) Transaksi Keuangan

- Meningkatkan perlindungan konsumen.
- Melakukan pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan upaya peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) secara optimal dan berkelanjutan dengan dukungan *smart farming*.
- Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
- Melakukan optimalisasi koordinasi dengan semua unsur terkait dalam menunjang proses penganggaran yang tepat waktu.
- Memaksimalkan pendapatan wajib pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan sistem pelaporan pajak dan retribusi daerah.

d. Smart Living

1) Normalisasi Tata Ruang

- Melaksanakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai dan layak.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal layak, nyaman, dan efisien bagi masyarakat serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.

2) Sarana Prasarana Kesehatan

- Membentuk Tim SPGDT untuk penanggulangan kegawatdaruratan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
- Membuat sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
- Melaksanakan sosialisasi SPGDT/*Ambulance PSC 119*.
- Membuat sistem informasi/digitalisasi pelayanan rumah sakit dari pendaftaran sampai monitoring pasien.



- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan pengadaan barang/jasa di bidang kesehatan.
- Melaksanakan sosialisasi SDM Rumah Sakit dan masyarakat untuk menggunakan SIMRS (E-RM, E-Dokter, E-Resep, E-Pasien).
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan bersih, serta mengupayakan kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih bagi masyarakat.

3) Sarana Prasarana Transportasi

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana fasilitas perhubungan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan kualitas *on time performance* (baik untuk pengamanan maupun pengawasan angkutan jalan)
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan.
- Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas layanan pengadaan barang/jasa di bidang transportasi.
- Mengembangkan infrastruktur sarana penghubung dan akses jalan.

e. Smart Society

1) Interaksi Masyarakat yang Efisien

- Meningkatkan akses pelayanan pendidikan.
- Meningkatkan program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Meningkatkan kualitas dan partisipasi Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Melakukan pendataan dan membuat sistem informasi layanan PPKS.
- Mengelola dan mengembangkan aplikasi sebagai media informasi ke masyarakat dan media pengaduan dari masyarakat.
- Memberikan pelatihan untuk menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku para SDM PSKS.
- Meningkatkan lembaga kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam membangun Desa.
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
- Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa yang menghasilkan.



- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kader Posyandu Desa dan PKK Desa.
- Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan terkait sistem informasi administrasi Pemerintahan Desa.
- Melakukan sosialisasi produk hukum Desa.
- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes.
- Melaksanakan pendampingan perencanaan pembangunan Desa.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Meningkatkan kepesertaan KB dan mengendalikan angka kelahiran.
- Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bersama *stakeholder*.
- Melaksanakan gerakan pencegahan perkawinan anak dalam rangka penurunan *stunting*.
- Meningkatkan peran aktif gugus tugas Kabupaten/KLA yang aktif dalam pencapaian indikator KLA.
- Memaksimalkan peran pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas) di setiap Kelurahan dan Desa
- Menyediakan akses *internet* di setiap Kelurahan atau Desa.

2) Ekosistem Belajar

- Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan.
- Mengembangkan program yang mengarah kepada pengembangan metodologi *e-learning* bagi anak usia dini, SD, SMP.
- Meningkatkan kesadaran pemanfaatan internet secara positif dan produktif.
- Mengkampanyekan cara bersosial media secara cerdas, sehat, anti diskriminasi dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan penguatan sosialisasi qanun dan penyuluhan agama islam menggunakan pendekatan TIK.
- Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP).
- Melaksanakan kegiatan optimalisasi PUG melalui PPRG.
- Melaksanakan pelatihan usaha rumahan perempuan.
- Melaksanakan pelatihan industri rumahan perempuan dan pelatihan KKG di bidang politik dan dunia usaha.
- Meningkatkan peran aktif forum anak daerah dalam pembangunan.



- Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
- Meningkatkan pendidikan dengan berbasis program sekolah, masjid ramah anak dan kota layak anak.
- Meningkatkan pelayanan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- Merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat.
- Menambah sarana prasarana pendidikan dan memaksimalkan keberadaan lembaga pendidikan di setiap Kelurahan atau Desa.
- Memberikan edukasi pernikahan dini.
- Mendorong lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
- Mendorong penggunaan KB untuk menekan angka kelahiran.
- Mendorong kerjasama antar dunia pendidikan dan Industri Dunia Kerja (IDUKA).

3) Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat

- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam dan sosial.
- Mengelola dan mengembangkan aplikasi sebagai media pelaporan dan pemberitahuan tanggap darurat bencana baik alam ataupun sosial.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kampung KB dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- Meningkatkan upaya pencegahan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan kekerasan pada anak.
- Meningkatkan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar.
- Mengembangkan sistem kearsipan yang terintegrasi (Aplikasi Srikandi).
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan.
- Meningkatkan kualitas pengorganisasian Satlinmas.
- Menyediakan sistem *call center* dan sistem *fast respon*.

f. Smart Environment

1) Proteksi Lingkungan

- Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana.
- Membentuk Desa Tangguh Bencana.
- Membentuk posko dan relawan sosial.
- Mengembangkan proses rekomendasi lingkungan berbasis internet.
- Melakukan penertiban laporan dokumen lingkungan dari pelaku usaha.
- Membangun dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengembangkan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
- Memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk.
- Memanfaatkan limbah organik untuk pengembangan budidaya *maggot*.
- Meningkatkan layanan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.
- Memanfaatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan (udara, air dan tanah) yang dapat diketahui masyarakat.
- Meningkatkan peran sekolah dalam mendukung lingkungan hidup.
- Meningkatkan pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan masyarakat.
- Meningkatkan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kebencanaan.
- Membangun sistem pelayanan laporan pelanggaran peraturan daerah, situasi darurat, bencana alam, serta kebakaran.

2) Pengelolaan Sampah dan Limbah

- Meningkatkan penerapan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Mendorong masyarakat/pelaku usaha untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang memiliki nilai.
- Meningkatkan capaian pengurangan sampah 30% hingga tahun 2027.
- Meningkatkan cakupan pelayanan sampah 100%.
- Meningkatkan layanan pengaduan 100% yang ditindaklanjuti.
- Melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan dan monitoring persampahan.
- Mengembangkan pengelolaan persampahan rumah tangga, industri dan publik yang terpadu berbasis teknologi.



- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan persentase sampah yang ditangani, jumlah *Bank* sampah yang terdaftar.
- Meningkatkan layanan jemputan sampah organik.
- Memanfaatkan gas Metan di Tempat Pembuangan Akhir.
- Membuat dan mengembangkan sistem informasi Bank Sampah.
- Melaksanakan monitoring mobilisasi pengangkutan sampah dengan GPS.
- Meningkatkan layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT3).
- Meningkatkan penanganan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

3) Tata Kelola Energi

- Memanfaatkan limbah kotoran hewan dan limbah pertanian menjadi biogas.
- Memanfaatkan limbah plastik menjadi bahan bakar.
- Melaksanakan kegiatan, penelitian dan pengembangan energi terbarukan.
- Mengembangkan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.
- Memenuhi kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat.
- Melaksanakan pendataan konsumsi listrik per kapita.
- Meningkatkan pencapaian rasio ketersediaan daya listrik.
- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.
- Melaksanakan program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.
- Meningkatkan persentase rumah tangga berakses listrik.
- Meningkatkan pengawasan bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi.

4. Rencana Aksi *Smart City* Tapin

a. *Smart Governance*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pelayanan Publik	Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.	2022	Mobil Operasional dan Perangkat Komputer/ <i>Laptop</i> .	2023	Sistem Perizinan <i>Online</i> OSS dan <i>SiCantik Cloud</i> .	2022	Diklat dan Sosialisasi tentang Sistem Perizinan OSS.	2022
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang MPP.	Pembentukan Peraturan Bupati untuk menunjang Regulasi pelaksanaan MPP.	2023	Gedung, Perangkat Komputer dan Perangkat Lunak.	2023	Sistem Informasi dan Perizinan.	2023	Diklat dan Sosialisasi tentang Sistem Perizinan OSS.	2023
	Program Penataan Administrasi Kependudukan.	Pengembangan dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pengembangan Manajemen dan Tata Kelola Data Kependudukan.	2022	Jaringan <i>Internet</i> (VPN), <i>Server</i> , <i>PC Client</i> , Mobil Pelayanan Keliling.	2022	SIAK terpusat aplikasi pelayanan publik.	2022	Sosialisasi syarat dan tatacara Pembuatan/Perubahan Data Kependudukan dan Implementasi <i>Digital</i> ID dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Tata Cara Pelayanan Publik.	2023
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil.								
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.									
	Program pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan.	Pengembangan Inovasi Pelayanan dan Pembuatan	2023	<i>Web Server</i> / VPN <i>Videotron</i> .	2023	<i>Web portal/web service</i> data kependudukan,	2023		

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Kebijakan Daerah implementasi NIK dalam pelayanan publik.				website, media sosial.			
	Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke daerah pedalaman/terpencil.	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja.	2023	Menara Jaringan, Jaringan <i>Fiber Optic</i> , <i>Wifi</i> Publik.	2023	Aplikasi Jaringan Mikrotik.	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.		2023	Menara Jaringan, Jaringan <i>Fiber Optic</i> , <i>Wifi</i> Publik.	2023	Aplikasi Jaringan Mikrotik.	2023		2023
	Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi layanan secara elektronik (<i>E Government</i>).		2023	Komputer <i>Server</i> .	2023	Website Aplikasi.	2023		2023
	Pengembangan Pusat Data terpadu.		2023	Komputer <i>Server</i> .	2023	Database Data Center.	2023		2023
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.		2023	Komputer <i>Server</i> .	2023	Database Data Center.	2023		2023
	Pengembangan Dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.		2023	Perangkat Siaran Digital, Pemancar Siaran, <i>Receiver Signal</i> , Perangkat Liputan Media, Perangkat Media Sosial.	2023	Website Aplikasi, Media Sosial, Siaran Televisi.	2023		2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Pengembangan dan Pengelolaan data statistik.		2023	Komputer <i>Server</i> .	2023	Database Data Center.	2023		2023
	Pengembangan pelayanan kesekretariatan.	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja.	2022	<i>Server/PC/Laptop/Android</i> .	2025	Program / <i>web</i> .	2025	Sosialisasi dan pelatihan.	2025
	Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi tentang produk hukum.								
	Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi kegiatan DPRD.								
	Peningkatan pelayanan kepada kinerja Anggota DPRD optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik.								
	Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (SAPA-Tapin) sebagai penyaji data dan informasi kepegawaian.	Pembuatan SK Kepala BKPSDM Tentang Penggunaan Aplikasi SIMPEG (SAPA-Tapin).	2022	<i>Server</i> Aplikasi pada Diskominfo.	2022	Aplikasi SIMPEG (SAPA-Tapin).	2022	Bimtek/sosialisasi/ <i>Workshop</i> Tentang Penggunaan Aplikasi Simpeg untuk seluruh pegawai	2022
	Pembuatan aplikasi "PaDaRingan-Pegawai" (Pelayanan Dalam jaRingan kePegawaian) untuk perbaikan kualitas	Pembuatan SK Kepala BKPSDM Tentang Penggunaan Aplikasi "PaDaRingan-Pegawai"	2022	<i>Server</i> Aplikasi pada Diskominfo.	2022	Aplikasi "PaDaRingan - Pegawai".	2022	Bimtek/sosialisasi/ <i>Workshop</i> Tentang Penggunaan Aplikasi PaDaRingan-	2022

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	pelayanan kepegawaian pada tahun 2022.							Pegawai untuk seluruh pegawai	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah (administrasi umum perangkat daerah dan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Keputusan Kepala tentang penunjukan pejabat pengadaan, pemeriksa, pengurus BMD.	2022	Pengadaan jaringan, penyediaan komputer, penyediaan <i>server</i> .	2023	Pengembangan E-Presensi.	2023	Sosialisasi, Bimtek.	2023
	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peraturan Bupati tentang Pengembangan E-Tamasa.	2023	<i>Server, Laptop.</i>	2023	Pengembangan E-Tamasa.	2023	Bimtek, <i>Workshop.</i>	2023
	Program penelitian dan pengembangan.	Peraturan Bupati tentang pengembangan Inovasi dan teknologi.	2022	<i>Server, Laptop.</i>	2022	E - Star	2022	Bimtek, <i>Workshop</i>	2022
	Program pelayanan publik dan tata laksana.	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja.	2022	Jaringan <i>internet</i> , komputerasasi.	2022	Sistem informasi terintegrasi.	2022	Pelatihan dan Bimtek.	2022
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	2022	Ruangan Khusus Untuk Perekaman KTP, Alat Perekaman KTP, Peningkatan Jaringan <i>Internet, Laptop, Printer</i> dan ATK.	2022	Aplikasi Simpelkan.	2023	Sosialisasi.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.								
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.	Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.		<i>Laptop, Printer, Sound System, Jaringan Internet.</i>		Sistem Informasi <i>online.</i>		Pelatihan.	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	2022	Ruangan KTP, Alat Perekaman KTP, Peningkatan Jaringan, <i>Laptop, Printer dan ATK</i>	2022	E-Lapor.	2022	Sosialisasi dan pelatihan	2023
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	Peraturan Bupati tentang Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.		<i>Laptop, Printer, Sound System, Jaringan Internet</i>		Sistem Informasi <i>online.</i>			
Birokrasi Pemerintah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten).	Pembentukan Perda tentang Rencana Umum Penanaman Modal.	2023	Perangkat Komputer/ <i>Laptop.</i>	2022	Sistem informasi investasi.	2023	Sosialisasi.	2023
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah).	Pembentukan Peraturan Bupati tentang SOP dan SP Pelayanan Perizinan.	2022	Perangkat Komputer/ <i>Laptop.</i>	2022	Sistem informasi <i>online.</i>	2022	Sosialisasi.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	Kebijakan peraturan prosedur dan pengawasan.	2022	Mobil Operasional, <i>Laptop, Printer</i>	2022	Sistem informasi pengawasan	2023	Sosialisasi, pelatihan dan Bimtek.	2023
	Kegiatan Pengawasan Internal.								
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
	Pengawasan, Legislasi, dan <i>Budgeter</i> .	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja.	2022	Sarana dan prasarana ruang rapat.	2023	Sistem terintegrasi	2023	Sosialisasi dan <i>workshop</i> .	2023
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.								
	Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui kegiatan pelatihan - pelatihan, Bimtek dan Studi Banding.								
	Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun eksteren.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan.	Peraturan Bupati tentang dokumen RKPD.	2023	<i>Server, Laptop.</i>	2023	Pengembangan E-tamasa	2023	Bimtek dan <i>workshop.</i>	2023
	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.								
	Peningkatan Kinerja (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.	Membentuk TIM SAKIP dan RB Kabupaten.	2022	Jaringan <i>internet.</i>	2022	Aplikasi E-SAKIP SKPD.	2022	Bimtek dan <i>workshop.</i>	2022
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.	Membentuk Tim Pendamping.	2022	Jaringan <i>Internet</i> dan perangkat komputerisasi.	2022	Program/ <i>web.</i>	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	2022	Tempat (Aula), <i>Laptop, Printer, ATK, LCD, Sound System.</i>	2022	Siskeudes, Sisalsa, Sitanti, Go Digital Desa (GIDES).	2023	Pelatihan dan sosialisasi.	2023
	Kebijakan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal.	Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	2022	Perangkat Komputer/ <i>Laptop.</i>	2022	Sistem informasi <i>online.</i>	2022	Sosialisasi dan bimtek.
Program Promosi Penanaman Modal.									
Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.		Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja.	2022	Sarana dan prasarana perkantoran.	2023	Sistem informasi terintegrasi.	2023	Sosialisasi dan bimtek.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat yang dapat terakomodir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terasilitasinya Kunjungan Kerja/studi banding/<i>workshop</i>/ Bimbingan Teknis Anggota DPRD untuk kelancaran tugas dan fungsi mereka. 2. Menghitung kebutuhan dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah serta memaksimalkan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada. 3. Terhimpunnya dokumen akuntabilitas dan kinerja Sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku. 							
	Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.	Terciptanya keselarasan pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan Visi dan Misi KDH pada RPJMD.							

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program penelitian dan pengembangan.	Peraturan tentang penelitian dan pengembangan bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan.	2023	<i>Laptop.</i>	2023	E - Star.	2023	Sosialisasi.	2023
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Peraturan tentang Pengembangan E - Tamasa.	2023	<i>Server, Laptop.</i>	2023	Pengembangan E - Tamasa dan <i>web</i> bappelitbang.go.id	2023	Bimtek dan <i>workshop.</i>	2023

b. Smart Branding

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kawasan Wisata Daerah	Pembuatan SOP dan Peraturan Bupati tentang pengembangan wisata Daerah	2023	Akses jalan dan jaringan <i>internet.</i>	2023	Sistem informasi wisata daerah.	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
	Pembuatan Media Sosial.	Pembentukan tim promosi wisata.	2022	<i>Handphone/Tablet.</i>	2023	<i>Internet/Wifi.</i>	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Pembuatan Aplikasi Promosi Pariwisata								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	berbasis <i>Website</i> .								
	Pembentukan Tim Kreatif Promosi Pariwisata.	SK Kepala SKPD untuk Tim Kreatif.	2022	PC dan <i>Laptop Editing</i> .	2023	<i>Aplikasi Windows</i> dan <i>Aplikasi Adobe Illustrator</i> .	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2026
	Pembuatan konten <i>video</i> untuk disebarluaskan melalui media digital.			Peralatan <i>Studio Video</i> dan <i>Film</i> .		<i>Aplikasi Adobe Premiere Pro</i> dan <i>After Effect</i> .			
	Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan melalui media digital.			Peralatan <i>Studio Gambar</i> .		<i>Aplikasi Adobe Photoshop</i> dan <i>Lightroom</i> .			
	Program <i>updating Website</i> Instansi Dinas.	Edaran Bupati	2022	Instalasi <i>Software</i> dan jaringan <i>internet</i>	2022	<i>Hosting, Domain</i> dan <i>Maintenance</i> .	2022		
	Pembuatan Dokumen Kajian Ekonomi Kreatif.	Peraturan Bupati	2023	<i>Laptop, PC</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i> .	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
	Pembuatan Aplikasi Pemesanan <i>Online Plaza Kuliner</i> .								2024
	Pembuatan Aplikasi Pemesanan Tiket <i>Online</i> untuk DTW Unggulan, Objek Cagar Budaya dan <i>Event</i>								
	Pendataan dan penyajian	Pembuatan SOP dan SK Tim	2022	<i>Laptop, Komputer PC</i> ,	2022	Sistem Informasi	2022	Pendataan dan	2022

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.	Pendataan		jaringan <i>internet</i> .		Geografis		sosialisasi.	
Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Pembuatan SOP, Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik.	2023	Ruang Pelayanan, Komputer/ <i>Laptop</i> , <i>Printer</i> , <i>scanner</i> , <i>Modem Wifi/Internet</i> , Mesin nomor antrian, HP <i>Android</i> .	2023	<i>Software</i> Aplikasi CMS, <i>e-office</i> , <i>MS Office</i> .	2023	Bimtek	2023
	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.	Pembuatan SOP dan SK Tim		Komputer/ <i>Laptop</i> , <i>Printer</i> , <i>Scanner</i> dan LCD.		Sistem informasi <i>online</i>		Sosialisasi dan pelatihan.	
	Program Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bakarangan.	Pembuatan SOP, Keputusan Bupati dan turunannya tentang pelayanan dibidang pengembangan potensi peningkatan perekonomian serta perizinan usaha yang efektif dan efisien.	2023	<i>Laptop</i> dan <i>printer</i> , sarana dan prasarana pendukung	2023	Sistem informasi berupa <i>website</i> atau berbasis <i>android</i> .	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
	Pembinaan dan Pendampingan IKM Mebel ke Pulau Jawa.	SK Kepala SKPD.	2023	Gedung Tempat Pelatihan/ <i>Workshop</i> .	2023	Sistem informasi terintegrasi.	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2026
	Pembinaan dan Pendampingan IKM Produk Anyaman Ke Pulau Jawa.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Sewa <i>Hosting Website</i> SIPIKAT.	Edaran Bupati	2022	Jaringan <i>Internet</i> .	2022	Website SIPIKAT (Sistem Informasi dan Promosi Industri Kabupaten Tapin).	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Melakukan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Teknis dan Manajemen Industri.	Peraturan daerah dan MoU/Nota Kesepahaman antar SKPD, Asosiasi Industri, dan Perguruan Tinggi.	2023	Gedung, jaringan <i>internet, laptop</i> dan <i>printer</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Menguatkan Pasokan dan Ketersediaan Bahan Baku (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) Melalui Koordinasi dengan Instansi Terkait Didukung oleh Infrastruktur yang Memadai.	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman antar SKPD dan Asosiasi Industri.	2023	Gedung, jaringan <i>internet, laptop</i> dan <i>printer</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Kerjasama dengan <i>Unicorn</i> Besar dalam Pemasaran Hasil Produk Industri Daerah.	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman antar SKPD dan <i>Unicorn</i>	2024	<i>Laptop</i> , Jaringan <i>Internet</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Memfasilitasi Kerjasama Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan/ <i>Bank</i> .	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman dengan Lembaga Keuangan/ <i>Bank</i> .	2024	<i>Laptop</i> , Jaringan <i>Internet</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Melakukan Studi Kajian Peluang Investasi Industri.	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman	2024	Gedung dan Jaringan <i>Internet</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		antar Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi Industri, Bappelitbang, dan Perguruan Tinggi.							
	Pembangunan dan Pemasaran Produk dan Jasa Industri Kreatif Daerah di Bendungan Tapin dan Lokasi <i>Rest Area</i> .	Kebijakan dan Peraturan Daerah serta pembentukan Tim Teknis untuk Realisasi Program/Kegiatan Pembangunan Industri.	2024	Akses Jalan, Gedung dan infrastruktur <i>rest area</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2024	<i>Website</i> SIPIKAT untuk Informasi dan Promosi.	2024	Sosialisasi, pelatihan dan <i>workshop</i> .	2024
	Inventarisasi Data IKM.	Pembentukan Tim Pelaksana.	2022	<i>Laptop, printer</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2022	Sitem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri.	Peraturan Daerah.	2024	Gedung, <i>Laptop, printer</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan <i>workshop</i> .	2024
	Program penggunaan Produk Lokal.	Peraturan Bupati tentang kebijakan penting dan wajibnya menggunakan produk lokal.	2023	<i>Laptop, printer</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i>	2023	Sosialisasi, <i>workshop</i> dan pelatihan	2023
	Pelatihan Kemasan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).	Pembentukan Tim Pelaksana.	2022	Gedung Pelatihan dan Pembelian Alat-Alat Pendukung Pelatihan.	2022	Sistem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
Wajah Kota	Pembangunan Jalan Pedestrian Untuk Menunjang Pariwisata	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2022	Pelebaran Jalan dan Marka Jalan, <i>Server</i> , Komputer PC, Kamera	2022	Sistem informasi terintegrasi.	2024	Sosialisasi, pelatihan dan <i>workshop</i> .	2022

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Rantau Baru.			Digital Panorama, peralatan GIS, ruang <i>control</i> , peralatan suhu dan udara.					
	Pembangunan Lintasan Khusus Jalur Sepeda di Wilayah Kota Rantau.		2024		2024				2024
	Pembangunan Bundaran Tugu Adipura.		2022		2022				2022
	Pembuatan Aplikasi <i>Virtual Tour</i> .		2023		2023				2023
	Program ketersediaan sistem informasi ruang publik.		2023		2023				2024
	Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas udara di ruang publik.		2023		2023				2023
	Program pembuatan aplikasi <i>tour guide</i> lokasi pemancingan berbasis GIS.		2024		2024				2024
	Program pengembangan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>		2024		2024				2024
	Program penghijauan kota.		2023		2023				2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program <i>landmark</i> khas Tapin.		2024		2024				2024

c. Smart Economy

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Industri Berdaya Saing	Program peningkatan produksi dan produk olahan cabai Hiyung.	SK Bupati	2022	Rumah kemasan, jaringan <i>internet</i> , peralatan dan bahan kemasan, komputer, <i>printer</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i>	2023	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2023
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.	Peraturan penjualan indukan ikan.	2023	Kolam, gedung, komputer, sarpras perikanan.	2024	Aplikasi <i>olshop</i> indukan ikan.	2024	Sosialisasi dan pelatihan	2024
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah.			Gedung dan sarana pemasaran dan peralatan komputer.	2025	ApliKasi <i>olshop</i> PEMAKAN (pemasaran <i>modern</i> agrobisnis perikanan).			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Peraturan pelaporan pemasaran ikan oleh pedagang grosir.	2024	Peralatan komputer, gedung dan sarpras.	2024	Aplikasi data perikanan.	2023		2023
	Pengelolaan Penangkapan	Peraturan kampung ikan		Sarpras budidaya, kapal				Sosialisasi, patroli,	2024

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah.	lokal.		pengawasan, peralatan komputer, dermaga, gedung, alat tangkap ramah lingkungan, papan seruan, <i>drone</i> , peralatan pengawasan.				pelatihan.	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Pembuatan rancangan Perbup tentang kawasan agribisnis berbasis korporasi petani/kelembagaan ekonomi petani (KEP).	2023	<i>Server/hosting</i> aplikasi.	2023	Aplikasi sistem informasi pertanian.	2023	Sosialisasi dan Pelatihan kepada Pelaku Utama Usaha Tani.	2023
	Pengembangan layanan air minum secara <i>digital</i> .	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman antar pemerintah daerah dengan PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda).	2022	Jaringan <i>internet</i> , komputer, <i>server</i> , <i>hosting</i> .	2023	Sistem informasi layanan air minum.	2023	Sosialisasi pemanfaatan sistem informasi layanan air minum.	2023
	Program Penunjang Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Surat Edaran Bupati tentang penggunaan aplikasi tamu <i>online</i> .	2023	Komputer untuk admin, LED TV/ <i>Videotron</i> untuk informasi di <i>lobby</i> dan ruang tunggu.	2023	Aplikasi Tamu <i>Online</i> .	2022	Sosialisasi penggunaan aplikasi melalui media sosial dan <i>offline</i> .	2023
	Menambah Unit Bumdes setiap desa dan UMKM lainnya.	Peraturan Bupati	2023	Gedung, komputer, <i>printer</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i> .	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Pembentukan dan SK Tim Pelaksana Penyusunan, Pemutakhiran, Analisis Peta	2023	Komputer, jaringan <i>internet</i> , <i>server</i> .	2024	Aplikasi SKPG	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.	Ketahanan dan Kerentanan Pangan.				Aplikasi QGIS			
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.	Peraturan Daerah dan MoU/Nota Kesepahaman antar pemerintah daerah dengan pihak terkait dalam penanganan kebutuhan pangan termasuk dengan Perguruan Tinggi.	2023	Gedung, komputer, <i>printer</i> , jaringan <i>internet</i> , <i>server</i> , <i>android</i> dan akun sosial media.	2024	Sistem informasi <i>online</i>	2024	Rapat koordinasi, sosialisasi dan pelatihan	2024
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.					Aplikasi Perhitungan PPH Ketersediaan	2024	Sosialisasi dan bimtek.	2024
						Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2024
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/Kota.					Aplikasi Krisna	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Tapin.					Sistem informasi <i>online</i>	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.								
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.					Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan.	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.					Aplikasi <i>E-budgeting</i> dan Aladin.	2024	Pelatihan Tematik kepada Kelompok Wanita Tani.	2024
	Program Penyuluhan Pertanian.	Pembuatan SOP Program Penyuluhan Pertanian.	2025	<i>Server/hosting.</i>	2025	Aplikasi berbasis teknologi <i>Artificial Intelligence (AI)</i> Pertanian (<i>Smart Farming</i>) berbasis <i>Android.</i>	2025	Sosialisasi dan Pelatihan kepada Pelaku Utama Usaha Tani.	2025
	Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	Surat Edaran Bupati tentang Pengadaan <i>Job Fair.</i>	2024	Pengadaan <i>Laptop.</i>	2024	Mengadakan <i>Event Job Fair.</i>	2024	Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.	2024
	Bursa Kerja <i>Online.</i>	Membuat rancangan Peraturan Bupati untuk mendukung Program Kerja.	2023	1. Pengadaan <i>Server</i> untuk mendukung Program Kerja. 2. Pemeliharaan infrastruktur dan	2023	Aplikasi Bursa <i>Online.</i>	2023	Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				pengembangan jaringan.					
	Pelatihan Teknologi Tepat Guna.	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.	2022	Pengadaan <i>Laptop</i> .	2022	Aplikasi pelatihan TTG.	2022	Pelatihan kepada masyarakat ke Desa/Kecamatan.	2023
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin.	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.	2022	<i>Workshop</i> , bengkel kerja, <i>laptop</i> .	2022	Aplikasi Pencaker.	2022	Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja.	2023
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja.	Berita Acara penyelesaian perselisihan antara pihak perusahaan dengan pekerja.	2022	Pengadaan <i>laptop</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.	2023
	Program Grebek Pasar.	MoU Pemda dengan PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (Perseroda).	2022	Jaringan <i>internet</i> , komputer, <i>server</i> , <i>hosting</i> , <i>portable printer</i> .	2022	<i>Core Banking</i> BPR.	2022	Sosialisasi Program Grebek Pasar.	2022
	Program pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan <i>skill</i> /keterampilan.	Edaran Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i> , komputer, <i>printer</i> , <i>android</i>	2022	Sistem informasi <i>online</i> (<i>Marketplace</i>).	2023	Sosialisasi, pelatihan dan <i>workshop</i>	2023
Transaksi Keuangan	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Perizinan secara elektronik.	Pembuatan Surat Edaran Bupati Tapin tentang Perolehan Perizinan secara elektronik, Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).	2022	Pengadaan <i>Server</i> untuk mendukung/ <i>hosting</i> aplikasi dan data, Pengadaan Komputer serta operator mahir.	2023	Pembuatan Aplikasi Pemberian Rekomendasi Izin Usaha.	2023	Pelatihan Operator, Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Pemenuhan Ekonomi Digital dengan mendorong Industri <i>e-commerce</i> dan <i>Marketplace</i> .	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).	2023	Pengadaan Server untuk mendukung/ <i>hosting</i> aplikasi dan data, Data Pelaku Usaha yang Akurat, Tenaga Ahli IT untuk operator dan <i>maintenance</i> .	2023	Pembuatan Aplikasi <i>E-Commerce</i> .	2023	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial.	2023
	Pembuatan Aplikasi <i>Database</i> Pasar.	Pembuatan Surat Edaran Bupati Tapin tentang Pembayaran secara Elektronik.	2023	1. Pengadaan <i>Server</i> untuk mendukung/ <i>hosting</i> aplikasi dan data. 2. Data Pelaku Usaha yang Akurat. 3. Tenaga Ahli IT untuk operator dan <i>maintenance</i> .	2023	Aplikasi <i>Database</i> Pasar.	2023	Sosialisasi secara Langsung dan Berkelanjutan terhadap Penyewa Toko/Los/Kios/Warung.	2023
	Pengembangan Pembayaran Retribusi secara Elektronik.	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	2025	Bangunan pasar dan perlengkapan.	2025	Pembayaran Retribusi secara Elektronik.	2025	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial.	2025
	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan yang <i>modern</i> .	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)		Pengelola Pasar yang memahami Teknologi Informasi.		Aplikasi Data Penyewa Toko.		Sosialisasi tentang pengelolaan pasar <i>modern</i> .	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.	Pembuatan Surat Edaran Bupati Tapin tentang Pemantauan Harga dan Stok Barang dan Barang Penting.	2023	Pengadaan <i>Server</i> untuk mendukung/ <i>hosting</i> aplikasi dan data.	2023	Aplikasi Informasi Harga barang pokok dan Barang Penting.	2024	Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Pembuatan Aplikasi Informasi Harga Barang Pokok dan Penting.	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).		Pengadaan Komputer serta operator mahir, Penambahan Papan Informasi Harga Barang Pokok dan Penting, Penambahan Tenaga Pendataan Barang Pokok dan Penting.					
	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi <i>Legal</i> .	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).	2023	Pengadaan Server untuk mendukung <i>hosting</i> aplikasi dan data, Pengadaan Komputer serta operator mahir, Data Alat UTTP yang Akurat.	2023	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi <i>Legal</i> .	2023	Pelatihan Operator dan Tenaga ahli yang bersertifikat.	2023
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	2023	Jaringan <i>internet</i> , komputer, <i>server</i> , <i>hosting</i> , dan <i>smartphone</i> .	2023	SIMDA Keuangan, FMIS, SIMDA BMD, SIPD, PINBUK.	2023	Sosialisasi Berkala Aplikasi <i>WEB</i> , SIMDA Keuangan, EFNIS, SIMDA BMD, SIPD	2023
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.						Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi SIMDA Keuangan, FMIS, SIMDA BMD, SIPD	
	Pengembangan Aplikasi Pendapatan Daerah.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati						1. Sosialisasi dan Bimtek Secara Berkala tentang Aplikasi SIM-	

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
						SPPT.		PBB, SIM-BPHTB, SIM Pendapatan Daerah dan E-SPPT. 2. Sosialisasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
	Program pelayanan pajak dan retribusi daerah.					Website, Media Sosial dan Call Center Bapenda Tapin.		1. Sosialisasi melalui publikasi media offline dan online serta media sosial 2. Pelatihan Hospitality (Keramahan Pelayanan).	
	Pengembangan <i>digital Banking</i> BPR.	MoU Pemda dengan PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera (Perseroda).	2026	Jaringan <i>internet</i> , komputer, <i>server</i> , <i>hosting</i> .	2022	Core banking BPR.	2022	Sosialisasi <i>digital banking</i> .	2026
	Program pengembangan <i>marketplace</i> .	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2022	Gedung, jaringan <i>internet</i> , <i>laptop</i> , <i>printer</i> , <i>hp android</i>	2023	Sistem informasi terintegrasi	2023	Sosialisasi, pelatihan, workshop dan bimtek.	2023

d. Smart Living

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Normalisasi Tata Ruang	Program peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan dukungan media sosial.	SK Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i> dan hp <i>android</i> .	2022	Akun media sosial: <i>Instagram</i> , <i>WA</i> , <i>Facebook</i> .	2022	Sosialisasi	2022
	Program peningkatan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di Kecamatan.								
	Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.	SK Kepala Dinas untuk tim pendataan RTLH, SK Bupati untuk masyarakat yang berhak menerima bantuan.	2023	Bahan bangunan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	2023	e-RTLH	2023	Sosialisasi	2023
	Penyederhanaan Perizinan dalam pembangunan perumahan.			Jaringan <i>internet</i> , <i>laptop</i> dan <i>printer</i>		Pengembangan <i>Website</i> Dinas untuk informasi Perizinan Pembangunan Perumahan.		Koordinasi dan sosialisasi.	
Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni.	SK Kepala Dinas RTLH dan SK Bupati			Bahan bangunan untuk rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).		e-BSPS		Pendataan melalui aplikasi dan Survei ke Lokasi Rumah Tidak Layak Huni.	

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyediaan dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman.	SK Kepala Dinas RTLH dan SK Bupati.		Bahan bangunan untuk fasilitas perumahan dan permukiman		Pengembangan <i>Website</i> Dinas untuk informasi Perumahan dan fasilitas umum perumahan di Kabupaten Tapin.		Sosialisasi untuk penyebaran informasi Perumahan di Kabupaten Tapin	
	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan dan Permukiman.	SK Kepala Dinas RTLH dan SK Bupati.		Bahan bangunan untuk Perbaikan Fasilitas Umum (FASUM) di Lingkungan Perumahan dan Permukiman					
Sarana Prasarana Kesehatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	SK Bupati	2023	Gedung, jaringan <i>internet</i> , <i>laptop</i> dan <i>printer</i>	2023	Sistem informasi <i>online</i> .	2023	Koordinasi, sosialisasi dan pelatihan	2023
	<i>Public Safety Center</i> (PSC) 119.	Peraturan Daerah	2022	Alat komunikasi, alat transportasi.	2022	<i>Website</i> PSC 119.	2023	Pelatihan dan <i>workshop</i>	2024
	Digitalisasi pelayanan.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2020	Jaringan <i>internet</i> , <i>laptop</i> , dan <i>printer</i>	2022	Sistem informasi manajemen Rumah Sakit <i>online</i> .	2022	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2022
	Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan Pengadaan Barang/Jasa.	SK Bupati	2022	Gedung, jaringan internet, <i>laptop</i> dan printer	2025	Aplikasi SIP (Sistem Informasi Pelaporan) dan E-Katalog lokal.	2025	Sosialisasi dan pelatihan.	2023
	Mengadakan Vaksinasi massal di setiap Desa	SK Bupati	2022	Gedung	2022	Sistem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi	2022
Sarana Prasarana	Program Penataan Ruang Parkir Umum yang	Kebijakan: Pengembangan regulasi dan tata kelola	2024	Fasilitas Parkir yang berstandar dan modern,	2024	Aplikasi Pembayaran Parkir Elektronik.	2024	Sosialisasi dan pelatihan.	2024

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Transportasi	dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik, Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Penunjang Pelabuhan dan Dermaga, serta pengadaan angkutan khusus untuk pelajar/siswa.	terkait standar operasional dan tata cara. Kelembagaan: Pembentukan tim teknis operasional dan <i>maintenance</i> .		Pelabuhan dan Dermaga, dan Angkutan Khusus untuk pelajar/siswa.					
	Program Pembangunan/Pengadaan Fasilitas ATCS (ATCS: <i>Area Traffic Control System</i> atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan).	Kebijakan: Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar operasional dan tata cara. Kelembagaan: Pembentukan tim teknis operasional dan <i>maintenance</i> ATCS	2024	<i>Server, Workstation</i> , yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dari seluruh persimpangan dalam satu area. <i>Wall map</i> , yang berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi dari <i>Local Controller</i> . <i>Local Controller</i> (pengontrol persimpangan). <i>Video Surveillance</i> (CCTV). <i>Vehicle Detector</i> .	2024	Aplikasi <i>ATCS Mobile</i> dan <i>WEB</i> .	2024	Koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2023
	Program Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Lampu Lalu Lintas Cerdas (Pembangunan/Pengadaan	Kebijakan: Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar operasional dan tata cara. Kelembagaan:	2023	<i>Hardware - CCTV</i> Kamera, Skenario Kamera, <i>Local Controller</i> (pengontrol	2024	Perangkat <i>Software</i> Pengawas Lampu Lalu Lintas Cerdas dan <i>Mikrokontroler</i> .	2024	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Fasilitas Rambu-rambu, <i>Traffic/Warning Light</i> ZOSS dan Marka Jalan dengan teknologi terbaru).	Pembentukan tim teknis operasional dan <i>maintenance</i> Lampu Lalu Lintas Cerdas.		persimpangan) Rambu-rambu, <i>Traffic/Warning Light</i> ZOSS dan Marka Jalan.					
	Program Pembangunan/ Pengadaan untuk Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Fasilitas <i>SmartCard</i> atau Bukti Lulus Uji Elektronik (<i>Blue</i>).	Kebijakan Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar operasional dan tata cara. Kelembagaan: Pembentukan tim teknis operasional dan <i>maintenance SmartCard</i> atau Bukti Lulus Uji Elektronik (<i>Blue</i>)	2023	Gedung Uji, peralatan yang modern, dan Fasilitas Pendukung <i>SmartCard</i> atau Bukti Lulus Uji Elektronik (<i>Blue</i>).	2024	Aplikasi <i>SmartCard</i>	2024	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek	2023

e. Smart Society

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat yang Efisien	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	SK Bupati	2022	Gedung, komputer, <i>printer</i> dan jaringan <i>internet</i>	2023	Aplikasi SIDATUKS "Sistem Informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial".	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Program Rehabilitasi Sosial.					1. Aplikasi DATU SUBAN "Data Terpadu Sosial"			

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
						Banua" 2. SIKS-NG "Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- <i>Next Generation</i> ".			
	Program Pemberdayaan Sosial.					1. Aplikasi DATU SUBAN "Data Terpadu Sosial Banua". 2. SIKS-SLRT "Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan Rujukan Terpadu".			
	Program peningkatan persentase PKK aktif.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	2022	Gedung, komputer, <i>printer</i> dan jaringan <i>internet</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i> .	2022	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2022
	Program peningkatan persentase Posyandu aktif.								
	Program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.								
	Program pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	SK Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i> , gedung balai, komputer dan <i>printer</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i> .	2023	Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan.	2023
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah.								
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.								
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah.								
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.								
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Cakupan Daerah.								
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.	SK Bupati.	2022	Stand Pameran, jaringan <i>internet</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah.								
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	1. Kerjasama layanan peserta didik dan pencegahan perkawinan anak dengan sekolah-sekolah se-Kabupaten Tapin. 2. SK Tim <i>driver</i> pencegahan perkawinan anak.	2022	Jaringan <i>internet</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i> , akun media sosial (WA, <i>Instagram</i> , <i>Facebook</i> , <i>Youtube</i>)	2022	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2022
	Kegiatan kerjasama dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan.	1. Perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama tentang konseling pranikah. 2. Perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Tentang	2022	Spanduk, jaringan <i>internet</i>	2022	Sistem informasi <i>online</i>	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Konseling Dispensasi Nikah. 3. Perjanjian dengan Kementrian agama dan Dinas Pendidikan untuk konseling peserta didik.							
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	SK Bupati	2022	Spanduk, brosur, <i>Banner</i> , dan jaringan <i>internet</i>	2022	Sistem informasi <i>online</i> dan akun media sosial (<i>Instagram, Facebook, Youtube</i>).	2022	Sosialisasi dan pelatihan.	2022
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.								
	Peningkatan Pelayanan dan Informasi (Otomasi Perpustakaan, Perpustakaan <i>Digital</i> , Layanan Ekstensi, Pelatihan ke Masyarakat untuk inklusi sosial).	Perbup tentang Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.	2023	<i>Server</i> , Tenaga IT, <i>Internet</i> , Mobil Perpustakaan Keliling, Narasumber.	2023	Aplikasi <i>Inlislite</i> , <i>E - book</i> pihak ketiga, Perangkat yang dapat menghubungkan Aplikasi <i>Inlislite</i> ke Mobil Keliling, <i>Internet</i> .	2023	Promosi Secara tercetak, <i>online</i> dan sosialisasi, Promosi dan sosialisasi ke masyarakat secara langsung.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Pameran dan Promosi (Pameran, <i>Website</i>).	Peraturan Bupati	2022	<i>Stand</i> Pameran, Tenaga It, Komputer, <i>Internet</i> .	2022	<i>Website</i> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin.	2022	Promosi Secara tercetak, <i>online</i> dan sosialisasi.	2023
	Gerakan Minat dan Budaya Baca (Aneka Lomba, Sosialisasi Perpustakaan).			Gedung, tempat lomba, Tempat, <i>Sound system</i> .					
	Rencana Pembuatan Aplikasi <i>Web</i> Kesbangpol	SK Kepala SKPD	2023	Jaringan <i>Internet</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i>	2023	Pelatihan dan bimtek.	2023
	Program tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>).	SK Bupati	2022	Bangunan, jaringan <i>internet</i> , komputer, dan <i>printer</i>	2022	Pengembangan Aplikasi Siaga (Pelayanan <i>Internet</i> dan Aplikasi <i>Digital</i> Desa (GIDES)).	2022	Pelatihan dan bimtek.	2022
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik wilayah kecamatan.	SK Bupati	2023	Komputer/ <i>Laptop</i> , <i>Printer</i> , Meja Kursi, Jaringan <i>Internet</i> .	2023	Sistem informasi <i>online</i> .	2023	Bimtek.	2023
	Ekosistem Belajar	Melaksanakan Rapat Gugus Tugas KLA.	SK Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i> .	2022	Sosialisasi dan pelatihan.
Program pemenuhan hak anak.									

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyediaan Bahan Perpustakaan (Tersedianya <i>Database</i> bahan perpustakaan).	Perbup tentang anjuran mengadakan perpustakaan atau pojok baca di desa, instansi, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi umum lainnya.	2022	<i>Server, Internet.</i>	2023	Aplikasi <i>Inlislite.</i>	2023	Promosi dan Sosialisasi.	2023
	Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan (Pendataan perpustakaan dan pustakawan).	<ol style="list-style-type: none"> Perbup tentang anjuran mengadakan perpustakaan atau pojok baca di desa, instansi, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi umum lainnya. Perbup tentang anjuran pengadaan bahan pustaka untuk desa, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi umum lainnya. 	2022	Aplikasi dari Perpunas (<i>Website NPP</i>).	2022	Aplikasi dari Perpunas (<i>Website</i> Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah) data.perpunas.go.id .	2022	Promosi dan Bimtek.	2022
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	SK Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i> , Kantor Desa, Aula Kantor Kecamatan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, <i>Server</i> .	2023	Sistem informasi terintegrasi.	2023	Sosialisasi dan bimtek.	2023
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.								
Sistem Keamanan	Koordinasi kampung siaga bencana.	Peraturan Daerah dan Bupati.	2022	Gedung dan jaringan <i>internet</i> .	2022	Sistem informasi <i>online</i> siaga bencana.	2022	Sosialisasi dan bimtek.	2022

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
dan Keselamatan Masyarakat	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota.								
	Program perlindungan hak perempuan.								
	Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.								
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip daerah.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2022	<i>Box</i> arsip, gedung, jaringan <i>internet</i> , komputer dan <i>printer</i> .	2022	Pengembangan Aplikasi Srikandi.	2023	Pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2022
	Bimbingan Teknis Kearsipan.								
	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah.								
	Sosialisasi Kearsipan.								
	Pemeliharaan Rutin Arsip Daerah.								
	Pengawasan Arsip.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Penyusunan PERBUP Kearsipan.								
	Penyusun PERDA Kearsipan.								
	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip.								
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	SK Bupati	2022	Jaringan <i>internet</i>	2023	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Trantib <i>Online</i> .	2023	Sosialisasi dan pelatihan.	2022

f. *Smart Environment*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana.	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SK Bupati dan SOP	2022	Jaringan <i>internet</i> , perahu karet, mesin <i>portable</i> , mobil pemadam, komputer, <i>printer</i> dan alat komunikasi.	2023	Sistem informasi terintegrasi	2023	Sosialisasi, pelatihan, <i>workshop</i> dan bimtek.	2023
	Program sistem layanan dan Karhutla								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program pelaksanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik.								
	Program desa tangguh bencana.								
	program posko dan relawan sosial.								
	program pengembangan lingkungan berbasis <i>internet</i> .								
	Program penertiban laporan dokumen lingkungan.								
	Program pengembangan RTH.								
	Program pengembangan keanekaragaman hayati.								
	Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah organik.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan.								
	Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan hidup.								
	Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui pos pengaduan masyarakat.								
	Program peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana.								
	Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.								
	Program penanganan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>).								
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	1. Peraturan Bupati tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis	2023	1. Tempat penampungan sampah sementara. 2. Tempat penampungan Akhir. 3. Alat Transportasi	2023	Pengembangan <i>Website</i> dlh.tapinkab.go.id.	2023	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2023

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		sampah rumah tangga. 2. MoU PDAM Tapin dengan Pemda Tapin tentang pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan		pengangkut sampah.					
	Program pengelolaan sampah berkelanjutan.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	2023	Bangunan, tempat sampah, jaringan <i>internet</i> , <i>laptop</i> , <i>printer</i> , mobil angkutan sampah.	2023	Sistem informasi terintegrasi.	2024	Sosialisasi, pelatihan, bimtek dan <i>workshop</i>	2023
	Program pemilahan sampah rumah tangga.								
	Program peningkatan capaian pengurangan sampah.								
	Program peningkatan cakupan pelayanan sampah.								
	Program poengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.								
	Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi <i>bank</i> sampah.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program pemanfaatan gas metan di TPA.								
	Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah berbasis GPS.								
	Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT 3).								
Tata Kelola Energi	Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan Limbah Kotoran Hewan Menjadi Biogas di Desa Sungai Bahalang.	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	2023	Sarana dan Prasarana pembuatan limbah Biogas, tempat penampungan limbah plastik, alat transportasi dan jaringan <i>internet</i> .	2023	Sistem informasi terintegrasi.	2024	Sosialisasi, pelatihan dan bimtek.	2023
	Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik.								
	Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan.								
	Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.								

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Rencana Aksi (Tahun)							
		Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat.								
	Program pendataan konsumsi listrik per kapita.								
	Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik.								
	Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.								
	Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.								
	Program peningkatan rumah tangga berakses listrik.								

5. Peta Jalan Pembangunan *Smart City* Tapin

Peta Jalan Implementasi program pembangunan *Smart City* merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan *Master plan Smart City* menjadi pelaksanaan pembangunan. Peta jalan pembangunan *Smart City* terbagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pembangunan Jangka Pendek, Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

a. *Smart Governance*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Pelayanan Publik	Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	200.000.000	APBD	DPMPTSP
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/pengadaan barang milik daerah penunjang MPP.	100.000.000	APBD	DPMPTSP
	Program penataan administrasi kependudukan.	333.977.500	APBD/DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pelayanan pencatatan sipil.	494.000.000	APBD/DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	168.114.000	APBD/DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.	21.800.000	APBD/DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke daerah pedalaman/terpencil.	200.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.	200.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan secara elektronik (<i>e - government</i>).	150.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pengembangan pusat data terpadu.	350.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Monitoring opini dan aspirasi publik.	50.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	100.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan data statistik.	75.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan pelayanan kesekretariatan.	69.457.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi tentang produk hukum.	20.000.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi kegiatan DPRD.	20.000.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik.	20.000.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) sebagai penyaji data dan informasi kepegawaian.	7.200.000	APBD	BKPSDM
	Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan dalam jaringan kepegawaian) untuk perbaikan kualitas pelayanan kepegawaian pada tahun 2022.	25.000.000	APBD	BKPSDM
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah (administrasi umum perangkat daerah dan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah.	51.200.000	APBD	Bappelitbang
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	72.000.000	APBD	Bappelitbang

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program penelitian dan pengembangan.	124.645.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pelayanan publik dan tata laksana.	11.000.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.	12.000.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	8.300.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.	9.100.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	10.400.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	14.000.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	15.000.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan
Birokrasi Pemerintah	Program pengembangan iklim penanaman modal (Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten).	25.000.000	APBD	DPMPTSP
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah).	23.000.000	APBD	DPMPTSP
	Program penyelenggaraan pengawasan.	44.840.000	APBD	Inspektorat
	Kegiatan pengawasan internal.	44.840.000	APBD	Inspektorat

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	44.840.000	APBD	Inspektorat
	Pengawasan, legislasi, dan <i>budgeter</i> .	535.348.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	235.700.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek dan studi banding.	175.500.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun eksteren.	110.000.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan.	51.400.000	APBD	Bappelitbang
	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.	52.500.000	APBD	Bappelitbang
	Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi.	548.379.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.	208.098.600	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	30.480.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
Kebijakan Publik	Program pelayanan penanaman modal.	420.000.000	APBD	DPMPSTP
	Program promosi penanaman modal.	50.000.000	APBD	DPMPSTP

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.	15.000.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat yang dapat terakomodir.	20.000.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.	722.920.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program penelitian dan pengembangan.	384.000.000	APBD	Bappelitbang
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	57.000.000	APBD	Bappelitbang

b. Smart Branding

Sub Dimensi	Program (kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Pariwisata	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kawasan wisata daerah	47.500.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Pembuatan media sosial.	10.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis <i>website</i> .	10.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata.	125.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan konten <i>video</i> untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	50.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Dimensi	Program (kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	100.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program <i>updating website</i> instansi dinas.	35.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif.	70.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi pemesanan online plaza kuliner.	40.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi pemesanan tiket <i>online</i> untuk DTW unggulan, objek cagar budaya dan <i>event</i> .	40.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pendataan dan penyajian data objek pemajuan kebudayaan daerah.	48.000.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	14.000.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.	9.000.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan bakarangan.	11.000.000	APBD	Kecamatan Tapin Tengah
	Pembinaan dan pendampingan ikm mebel ke Pulau Jawa.	17.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembinaan dan pendampingan ikm produk anyaman ke Pulau Jawa.	20.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Sewa <i>hosting website</i> Sipikat.	10.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis dan manajemen industri.	44.000.000	APBD	Dinas Perindustrian

Sub Dimensi	Program (kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.	29.500.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Kerjasama dengan <i>unicorn</i> besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah.	25.600.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ <i>Bank</i> .	15.500.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan studi kajian peluang investasi industri.	30.200.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri kreatif daerah di Bendungan Tapin dan lokasi <i>rest area</i> .	100.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Inventarisasi data IKM.	31.200.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan peruntukan industri.	200.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Program penggunaan produk lokal.	25.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pelatihan kemas UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).	32.500.000	APBD	Dinas Perindustrian
Wajah Kota	Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang pariwisata Rantau Baru.	5.000.000.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah Kota Rantau.	5.000.000.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan bundaran Tugu Adipura.	2.000.000.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang

Sub Dimensi	Program (kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pembuatan aplikasi <i>Virtual Tour</i> .	200.000.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Program ketersediaan sistem informasi ruang publik.	360.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas udara di ruang publik.	500.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pembuatan aplikasi <i>Tour Guide</i> lokasi pemancingan berbasis gis.	270.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pengembangan <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i>	1.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program penghijauan Kota.	110.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program <i>landmark</i> khas Tapin.	200.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

c. Smart Economy

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Industri Berdaya Saing	Program peningkatan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung.	45.000.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan pembudidayaan ikan.	500.000.000	PAD	Dinas Perikanan
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah.	50.000.000	PAD	Dinas Perikanan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100.000.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah.	200.000.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	200.000.000	PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda)	Sekretariat Daerah
	Pengembangan layanan air minum secara <i>digital</i> .	32.000.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.	19.759.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat
	Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM lainnya.	15.600.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Selatan
Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota.	21.500.100	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.	53.600.100	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota.	1.004.384.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.	26.900.100	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	2.000.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	207.360.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	264.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	86.400.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	240.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	200.000.000	APBD	Dinas Pertanian
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun.	137.482.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.	91.050.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Program penyuluhan pertanian.	23.000.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.	20.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Bursa kerja <i>online</i> .	17.425.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pelatihan teknologi tepat guna.	500.000.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK tapin.	25.800.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja.	47.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Program grebek pasar.	15.000.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Selatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan <i>skill</i> /keterampilan.	29.400.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Transaksi Keuangan	Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara elektronik.	20.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i> .	70.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi <i>database</i> pasar.	120.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pengembangan pembayaran retribusi secara elektronik.	30.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang <i>modern</i> .	200.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.	17.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan penting.	50.000.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi <i>legal</i> .	211.672.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Program pengelolaan keuangan daerah.	25.000.000	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah.	23.000.000	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengembangan aplikasi pendapatan daerah.	200.000.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah
	Program pelayanan pajak dan retribusi daerah.	223.000.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pengembangan <i>Digital Banking</i> BPR.	250.000.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pengembangan <i>marketplace</i> .	12.000.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat

d. *Smart Living*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Normalisasi Tata Ruang	Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan media sosial.	179.183.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di Kecamatan.	13.095.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.	471.500.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan.	60.000.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni.	125.000.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.	79.000.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perbaikan prasarana, sarana dan <i>utilitas</i> umum di lingkungan perumahan dan permukiman.	195.300.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sarana Prasarana Kesehatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.328.540.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<i>Public Safety Center</i> (PSC) 119.	250.000.000	APBD, DAK	Dinas Kesehatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Digitalisasi pelayanan.	350.000.000	BLUD	RSUD Datu Sanggul
	Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan pengadaan barang/jasa.	50.000.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Mengadakan vaksinasi <i>massal</i> di setiap Desa	9.500.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Utara
Sarana Prasarana Transportasi	Program penataan ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik, pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang pelabuhan dan dermaga, serta pengadaan angkutan khusus untuk pelajar/siswa.	1.000.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan).	1.000.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu lalu lintas cerdas (pembangunan/pengadaan fasilitas rambu-rambu, <i>traffic/warning light zoss</i> dan marka jalan dengan teknologi terbaru).	200.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan untuk gedung pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas <i>smartcard</i> atau bukti lulus uji elektronik (<i>blue</i>).	2.000.000.000	APBD	Dinas Perhubungan

e. *Smart Society*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Interaksi Masyarakat yang Efisien	Program perlindungan dan jaminan sosial.	6.294.221.000	APBD	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial.			

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program pemberdayaan sosial.	1.304.144.900	APBD	Dinas Sosial
	Program peningkatan persentase PKK aktif.	1.256.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan persentase Posyandu aktif.			
	Program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.	1.279.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan.	248.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	1.401.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.	49.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	1.614.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah.	968.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.	369.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.	232.000.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.	34.973.000	APBD	DP3A

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah.	61.727.000	APBD	DP3A
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	55.467.000	APBD	DP3A
	Kegiatan kerjasama dengan kementerian agama, pengadilan agama dan dinas pendidikan.	24.340.000	APBD	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	132.379.000	APBD	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.	123.052.000	APBD	DP3A
	Peningkatan pelayanan dan informasi (otomasi perpustakaan, perpustakaan <i>digital</i> , layanan ekstensi, pelatihan ke masyarakat untuk inklusi sosial).	250.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pameran dan promosi (pameran, <i>website</i>).	150.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Gerakan minat dan budaya baca (aneka lomba, sosialisasi Perpustakaan).	50.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rencana pembuatan aplikasi <i>web</i> Kesbangpol.	10.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>).	20.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah Kecamatan.	30.000.000	APBD	Kecamatan Benuang
Ekosistem Belajar	Melaksanakan rapat gugus tugas KLA.	23.487.000	APBD	DP3A

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program pemenuhan hak anak.	6.755.000	APBD	DP3A
	Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya <i>database</i> bahan Perpustakaan).	33.330.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pembinaan dan pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan (Pendataan Perpustakaan dan Pustakawan).	43.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	45.000.000	APBD	Kecamatan Hatungan
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.	24.000.000	APBD	Kecamatan Hatungan
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	Koordinasi kampung siaga bencana.	16.706.400	APBD	Dinas Sosial
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota.	364.682.100	APBD	DP3A
	Program perlindungan hak perempuan.			
	Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.	146.000.000	APBD	DP3A
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	4.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Bimbingan teknis kearsipan.	25.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip Daerah.	15.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sosialisasi kearsipan.	21.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Pemeliharaan rutin arsip Daerah.	20.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengawasan arsip.	7.500.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan Perbup kearsipan.	30.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusun Perda kearsipan.	26.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan jadwal retensi arsip.	15.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	2.500.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

f. Smart Environment

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Proteksi Lingkungan	Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana.	156.902.000	APBD	BPBD
	Program sistem layanan dan Karhutla.	235.000.000	APBD	BPBD
	Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik.	120.000.000	APBD	BPBD
	Program Desa tangguh bencana.	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program Posko dan relawan sosial.	5.358.127.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengembangan lingkungan berbasis <i>internet</i> .	34.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penertiban laporan dokumen lingkungan.	14.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengembangan RTH.	321.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengembangan keanekaragaman hayati.	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah organik.	34.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan.	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan hidup	25.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan masyarakat.	45.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana.	200.000.000	APBD	BPBD
	Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.	43.000.000	APBD	BPBD
	Program penanganan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>).	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah dan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	21.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
Limbah	Program pengelolaan sampah berkelanjutan.	10.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemilahan sampah rumah tangga.	21.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan capaian pengurangan sampah.	31.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan cakupan pelayanan sampah.	11.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.	50.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi bank sampah.	134.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemanfaatan gas metan di TPA.	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah berbasis GPS.	110.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT3).	98.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Energi	Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan limbah kotoran hewan menjadi biogas di Desa Sungai Bahalang.	35.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik.	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan.	43.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.	121.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Pendek (2022 - 2023)	Sumber Dana	Leading Sector
	Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat.	12.000.000	APBD	Kecamatan Piani
	Program pendataan konsumsi listrik per kapita.	18.000.000	APBD	Kecamatan Bungur
	Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik.	16.600.000	APBD	Kecamatan Bungur
	Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.	123.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.	19.000.000	APBD	Kecamatan Piani
	Program peningkatan rumah tangga berakses listrik.	16.000.000	APBD	Kecamatan Piani

2. Pembangunan Jangka Menengah, Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

a. *Smart Governance*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Pelayanan Publik	Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	DPMPSTP
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/pengadaan barang milik daerah penunjang MPP.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	DPMPSTP
	Program penataan administrasi kependudukan.	333.977.000	350.676.000	361.196.000	386.480.000	405.804.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
								dan Pencatatan Sipil.
	Program pelayanan pencatatan sipil.	494.000.000	518.700.000	534.261.000	571.659.000	600.242.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	168.114.000	176.519.000	181.815.000	194.542.000	204.269.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.	21.800.000	22.890.000	23.576.000	25.227.000	26.488.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke daerah pedalaman/terpencil.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.050	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan secara elektronik (<i>e - government</i>).	150.000.000	157.500.000	162.225.000	173.580.000	182.259.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan pusat data terpadu.	350.000.000	367.500.000	378.525.000	405.021.000	425.272.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Monitoring opini dan aspirasi publik.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan data statistik.	75.000.000	78.750.000	81.112.000	86.790.000	91.129.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan pelayanan kesekretariatan.	69.457.000	72.930.000	75.118.000	80.376.000	84.395.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi tentang produk hukum.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi kegiatan DPRD.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) sebagai penyaji data dan informasi kepegawaian.	7.200.000	7.560.000	7.786.000	8.331.000	8.748.000	APBD	BKPSDM
	Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan dalam jaringan kepegawaian) untuk perbaikan kualitas pelayanan kepegawaian pada tahun 2022.	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	BKPSDM
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah (administrasi umum perangkat daerah dan pengadaan BMD	51.200.000	53.760.000	55.372.000	59.248.000	62.211.000	APBD	Bappelitbang

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	penunjang urusan pemerintah daerah.							
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	72.000.000	75.600.000	77.868.000	83.318.000	87.484.000	APBD	Bappelitbang
	Program penelitian dan pengembangan.	124.645.000	130.877.000	134.804.000	144.240.000	151.452.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pelayanan publik dan tata laksana.	11.000.000	11.550.000	11.896.000	12.729.000	13.365.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.	12.000.000	12.600.000	12.978.000	13.886.000	14.580.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	8.300.000	8.715.000	8.976.000	9.604.000	10.085.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.	9.100.000	9.555.000	9.841.000	10.530.000	11.057.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	10.400.000	10.920.000	11.247.000	12.034.000	12.636.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	14.000.000	14.700.000	15.141.000	16.200.000	17.010.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	15.000.000	15.750.000	16.222.000	17.358.000	18.225.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Birokrasi Pemerintah	Program pengembangan iklim penanaman modal (Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten).	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	DPMPTSP
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah).	23.000.000	24.150.000	24.874.000	26.615.000	27.946.000	APBD	DPMPTSP
	Program penyelenggaraan pengawasan.	44.840.000	47.082.000	48.494.000	51.889.000	54.483.000	APBD	Inspektorat
	Kegiatan pengawasan internal.	44.840.000	47.082.000	48.494.000	51.889.000	54.483.000	APBD	Inspektorat
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	44.840.000	47.082.000	48.494.000	51.889.000	54.483.000	APBD	Inspektorat
	Pengawasan, legislasi, dan <i>budgeter</i> .	535.348.000	562.115.000	578.978.000	619.507.000	650.482.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	235.700.000	247.485.000	254.909.000	272.753.000	286.390.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek dan studi banding.	175.500.000	184.275.000	189.803.000	203.089.000	213.243.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun eksteren.	110.000.000	115.500.000	118.965.000	127.292.000	133.657.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan.	51.400.000	53.970.000	55.589.000	59.480.000	62.454.000	APBD	Bappelitbang

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.	52.500.000	55.125.000	56.778.000	60.753.000	63.790.000	APBD	Bappelitbang
	Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi.	548.379.000	575.797.000	593.071.000	634.586.000	666.316.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.	208.098.000	218.503.000	225.058.000	240.812.000	252.853.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	30.480.000	32.004.000	32.964.000	35.271.000	37.035.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
Kebijakan Publik	Program pelayanan penanaman modal.	420.000.000	441.000.000	454.230.000	486.026.000	510.327.000	APBD	DPMPSTSP
	Program promosi penanaman modal.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	DPMPSTSP
	Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.	15.000.000	15.750.000	16.222.000	17.358.000	18.225.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat yang dapat terakomodir.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.	722.920.000	759.066.000	781.837.000	836.566.000	878.394.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program penelitian dan pengembangan.	384.000.000	403.200.000	415.296.000	444.366.000	466.585.000	APBD	Bappelitbang
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	57.000.000	59.850.000	61.645.000	65.960.000	69.258.000	APBD	Bappelitbang

b. Smart Branding

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Pariwisata	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kawasan wisata daerah	47.500.000	49.875.000	51.371.000	54.967.000	57.715.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Pembuatan media sosial.	10.000.000	10.500.000	10.815.000	11.572.000	12.150.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis <i>website</i> .	10.000.000	10.500.000	10.815.000	11.572.000	12.150.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata.	125.000.000	131.250.000	135.187.000	144.650.000	151.883.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan konten <i>video</i> untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program <i>updating website</i> instansi dinas.	35.000.000	36.750.000	37.852.000	40.502.000	42.527.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif.	70.000.000	73.500.000	75.705.000	81.004.000	85.054.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pembuatan aplikasi pemesanan online plaza kuliner.	40.000.000	42.000.000	43.260.000	46.288.000	48.602.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi pemesanan tiket <i>online</i> untuk dtw unggulan, objek cagar budaya dan <i>event</i> .	40.000.000	42.000.000	43.260.000	46.288.000	48.602.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pendataan dan penyajian data objek pemajuan kebudayaan daerah.	48.000.000	50.400.000	51.912.000	55.545.000	58.323.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	14.000.000	14.700.000	15.141.000	16.200.000	17.010.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.	9.000.000	9.450.000	9.733.000	10.414.000	10.935.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bakarangan.	11.000.000	11.550.000	11.896.000	12.729.000	13.365.000	APBD	Kecamatan Tapin Tengah
	Pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau Jawa.	17.000.000	17.850.000	18.385.000	19.672.000	20.656.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembinaan dan pendampingan IKM produk anyaman ke Pulau Jawa.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Sewa <i>hosting website</i> Sipikat.	10.000.000	10.500.000	10.815.000	11.572.000	12.150.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi	44.000.000	46.200.000	47.586.000	50.917.000	53.462.000	APBD	Dinas

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	teknis dan manajemen industri.							Perindustrian
	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.	29.500.000	30.975.000	31.904.000	34.137.000	35.844.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Kerjasama dengan <i>unicorn</i> besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah.	25.600.000	26.880.000	27.686.000	29.624.000	31.105.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ <i>Bank</i> .	15.500.000	16.275.000	16.763.000	17.936.000	18.833.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan studi kajian peluang investasi industri.	30.200.000	31.710.000	32.661.000	34.947.000	36.694.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri kreatif daerah di bendungan tapin dan lokasi rest area.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Inventarisasi data IKM.	31.200.000	32.760.000	33.742.000	36.104.000	37.910.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan peruntukan industri.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Program penggunaan produk lokal.	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pelatihan kemas UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).	32.500.000	34.125.000	35.148.000	37.609.000	39.489.000	APBD	Dinas Perindustrian

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Wajah Kota	Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang pariwisata Rantau baru.	5.000.000.000	5.250.000.000	5.407.500.000	5.786.025.000	6.075.326.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah Kota Rantau.	5.000.000.000	5.250.000.000	5.407.500.000	5.786.025.000	6.075.326.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan bundaran Tugu Adipura.	2.000.000.000	2.100.000.000	2.163.000.000	2.314.410.000	2.430.130.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan aplikasi <i>Virtual Tour</i> .	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Program ketersediaan sistem informasi ruang publik.	360.000.000	378.000.000	389.340.000	416.593.000	437.423.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas udara di ruang publik.	500.000.000	525.000.000	540.750.000	578.602.000	607.532.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pembuatan aplikasi <i>Tour Guide</i> lokasi pemancingan berbasis GIS.	270.000.000	283.500.000	292.005.000	312.445.000	328.067.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pengembangan <i>Area Traffic Control System</i>	1.000.000.000	1.050.000.000	1.081.500.000	1.157.205.000	1.215.065.000	APBD	Dinas

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	(ATCS)							Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program penghijauan kota.	110.000.000	115.500.000	118.965.000	127.292.000	133.657.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program <i>landmark</i> khas Tapin.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

c. Smart Economy

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Industri Berdaya Saing	Program peningkatan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung.	45.000.000	47.250.000	48.667.000	52.074.000	54.677.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan pembudidayaan ikan.	500.000.000	525.000.000	540.750.000	578.602.000	607.532.000	PAD	Dinas Perikanan
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	PAD	Dinas Perikanan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda)	Sekretariat Daerah
	Pengembangan layanan air minum secara <i>digital</i> .	32.000.000	33.600.000	34.608.000	37.030.000	38.882.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.	19.759.000	20.747.000	21.370.000	22.866.000	24.009.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat
	Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM lainnya.	15.600.000	16.380.000	16.871.000	18.052.000	18.955.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Selatan
Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota.	21.500.000	22.575.000	23.252.000	24.880.000	26.124.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.	53.600.000	56.280.000	57.968.000	62.026.000	65.127.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota.	1.004.384.000	1.054.603.000	1.086.241.000	1.162.278.000	1.220.392.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.	26.900.000	28.245.000	29.092.000	31.128.000	32.685.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	2.000.000.000	2.100.000.000	2.163.000.000	2.314.410.000	2.430.130.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	207.360.000	217.728.000	224.259.000	239.958.000	251.955.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	264.000.000	277.200.000	285.516.000	305.502.000	320.777.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	86.400.000	90.720.000	93.441.000	99.982.000	104.981.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	240.000.000	252.000.000	259.560.000	277.729.000	291.615.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Pertanian
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun.	137.482.000	144.356.000	148.687.000	159.095.000	167.050.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.	91.050.000	95.602.000	98.470.000	105.363.000	110.631.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Program penyuluhan pertanian.	23.000.000	24.150.000	24.874.000	26.615.000	27.946.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Bursa kerja <i>online</i> .	17.425.000	18.296.000	18.845.000	20.164.000	21.172.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pelatihan teknologi tepat guna.	500.000.000	525.000.000	540.750.000	578.602.000	607.532.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK tapin.	25.800.000	27.090.000	27.902.000	29.855.000	31.348.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja.	47.000.000	49.350.000	50.830.000	54.388.000	57.108.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Program grebek pasar.	15.000.000	15.750.000	16.222.000	17.358.000	18.225.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Selatan
	Program pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan <i>skill</i> /keterampilan.	29.400.000	30.870.000	31.796.000	34.021.000	35.722.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Transaksi Keuangan	Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara elektronik.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i> .	70.000.000	73.500.000	75.705.000	81.004.000	85.054.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi <i>database</i> pasar.	120.000.000	126.000.000	129.780.000	138.864.000	145.807.000	APBD	Dinas Perdagangan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pengembangan pembayaran retribusi secara elektronik.	30.000.000	31.500.000	32.445.000	34.716.000	36.451.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang modern.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.	17.000.000	17.850.000	18.385.000	19.672.000	20.656.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan penting.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi legal.	211.672.000	222.255.000	228.923.000	244.948.000	257.195.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Program pengelolaan keuangan daerah.	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah.	23.000.000	24.150.000	24.874.000	26.615.000	27.946.000	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengembangan aplikasi pendapatan daerah.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah
	Program pelayanan pajak dan retribusi daerah.	223.000.000	234.150.000	241.174.000	258.056.000	270.959.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pengembangan <i>Digital Banking</i> BPR.	250.000.000	262.500.000	270.375.000	289.301.000	303.766.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pengembangan <i>marketplace</i> .	12.000.000	12.600.000	12.978.000	13.886.000	14.580.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat

d. *Smart Living*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Normalisasi Tata Ruang	Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan media sosial.	179.183.000	188.143.000	193.787.000	207.352.000	217.720.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di Kecamatan.	13.095.000	13.750.000	14.163.000	15.154.000	15.912.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.	471.500.000	495.075.000	509.927.000	545.622.000	572.903.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan.	60.000.000	63.000.000	64.890.000	69.432.000	72.903.000	APBD	Dinas Perumahan,

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
								Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni.	125.000.000	131.250.000	135.187.000	144.650.000	151.883.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.	79.000.000	82.950.000	85.438.000	91.419.000	95.990.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perbaiki prasarana, sarana dan <i>utilitas</i> umum di lingkungan perumahan dan permukiman.	195.300.000	205.065.000	211.216.000	226.002.000	237.302.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sarana Prasarana Kesehatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.	1.328.540.000	1.394.967.000	1.436.816.000	1.537.393.000	1.614.262.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<i>Public Safety Center (PSC) 119.</i>	250.000.000	262.500.000	270.375.000	289.301.000	303.766.000	APBD, DAK	Dinas Kesehatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Digitalisasi pelayanan.	350.000.000	367.500.000	378.525.000	405.021.000	425.272.000	BLUD	RSUD Datu Sanggul
	Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan pengadaan barang/jasa.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Mengadakan vaksinasi <i>massal</i> di setiap Desa	9.500.000	9.975.000	10.274.000	10.993.000	11.543.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Utara
Sarana Prasarana Transportasi	Program penataan ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik, pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang pelabuhan dan dermaga, serta pengadaan angkutan khusus untuk pelajar/siswa.	1.000.000.000	1.050.000.000	1.081.500.000	1.157.205.000	1.215.065.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> atau yang lebih dikenal dengan istilah <i>atcs</i> adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.	1.000.000.000	1.050.000.000	1.081.500.000	1.157.205.000	1.215.065.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu lalu lintas cerdas (pembangunan/pengadaan fasilitas rambu-rambu, <i>traffic/warning light zoss</i> dan marka jalan dengan teknologi terbaru).	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan untuk gedung pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas	2.000.000.000	2.100.000.000	2.163.000.000	2.314.410.000	2.430.130.000	APBD	Dinas Perhubungan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	<i>smartcard</i> atau bukti lulus uji elektronik (<i>blue</i>).							

e. Smart Society

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Interaksi Masyarakat yang Efisien	Program perlindungan dan jaminan sosial.	6.294.221.000	6.608.932.000	6.807.200.000	7.283.704.000	7.647.889.000	APBD	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi sosial.							
	Program pemberdayaan sosial.	1.304.144.000	1.369.352.000	1.410.432.000	1.509.162.000	1.584.621.000	APBD	Dinas Sosial
	Program peningkatan persentase PKK aktif.	1.256.000.000	1.318.800.000	1.358.364.000	1.453.449.000	1.526.121.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan persentase Posyandu aktif.							
	Program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.	1.279.000.000	1.342.950.000	1.383.238.000	1.480.065.000	1.554.068.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program pembangunan dan pengembangan	248.000.000	260.400.000	268.212.000	286.986.000	301.336.000	APBD	Dinas	

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	ekonomi pedesaan.							Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	1.401.000.000	1.471.050.000	1.515.181.000	1.621.244.000	1.702.306.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.	49.000.000	51.450.000	52.993.000	56.703.000	59.538.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	1.614.000.000	1.694.700.000	1.745.541.000	1.867.728.000	1.961.115.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah.	968.000.000	1.016.400.000	1.046.892.000	1.120.174.000	1.176.183.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah.	369.000.000	387.450.000	399.073.000	427.008.000	448.359.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.	232.000.000	243.600.000	250.908.000	268.471.000	281.895.000	APBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
								KB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.	34.973.000	36.721.000	37.823.000	40.471.000	42.494.000	APBD	DP3A
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah.	61.727.000	64.814.000	66.758.000	71.431.000	75.003.000	APBD	DP3A
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan <i>Gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	55.467.000	58.240.000	59.987.000	64.187.000	67.396.000	APBD	DP3A
	Kegiatan kerjasama dengan kementerian agama, pengadilan agama dan dinas pendidikan.	24.340.000	25.557.000	26.323.000	28.166.000	29.574.000	APBD	Dinas Pendidikan
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan <i>Gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	132.379.000	138.998.000	143.168.000	153.190.000	160.850.000	APBD	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.	123.052.000	129.205.000	133.081.000	142.397.000	149.517.000	APBD	DP3A
	Peningkatan pelayanan dan informasi (otomasi perpustakaan, perpustakaan digital, layanan ekstensi, pelatihan ke masyarakat untuk inklusi sosial).	250.000.000	262.500.000	270.375.000	289.301.000	303.766.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pameran dan promosi (pameran, <i>website</i>).	150.000.000	157.500.000	162.225.000	173.580.000	182.259.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Gerakan minat dan budaya baca (aneka lomba, sosialisasi perpustakaan).	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rencana pembuatan aplikasi <i>web</i> kesbangpol.	10.000.000	10.500.000	10.815.000	11.572.000	12.150.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>).	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah kecamatan.	30.000.000	31.500.000	32.445.000	34.716.000	36.451.000	APBD	Kecamatan Binuang
	Ekosistem Belajar	Melaksanakan rapat gugus tugas KLA.	23.487.000	24.662.000	25.402.000	27.180.000	28.539.000	APBD
	Program pemenuhan hak anak.	6.755.000	7.093.000	7.306.000	7.817.000	8.208.000	APBD	DP3A
	Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya <i>database</i> bahan Perpustakaan).	33.330.000	34.996.000	36.046.000	38.569.000	40.498.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pembinaan dan pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan (Pendataan Perpustakaan dan	43.000.000	45.150.000	46.504.000	49.759.000	52.247.000	APBD	Dinas Perpustakaan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Pustakawan).							dan Kearsipan
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	45.000.000	47.250.000	48.667.000	52.074.000	54.677.000	APBD	Kecamatan Hatungan
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.	24.000.000	25.200.000	25.956.000	27.772.000	29.161.000	APBD	Kecamatan Hatungan
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	Koordinasi kampung siaga bencana.	16.706.000	17.541.000	18.067.000	19.332.000	20.299.000	APBD	Dinas Sosial
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota.	364.682.000	382.916.000	394.403.000	422.011.000	443.112.000	APBD	DP3A
	Program perlindungan hak perempuan.							
	Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.	146.000.000	153.300.000	157.899.000	168.951.000	177.399.000	APBD	DP3A
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	4.000.000	4.200.000	4.326.000	4.628.000	4.860.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Bimbingan teknis kearsipan.	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip Daerah.	15.000.000	15.750.000	16.222.000	17.358.000	18.225.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Sosialisasi kearsipan.	21.000.000	22.050.000	22.711.000	24.301.000	25.516.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan rutin arsip Daerah.	20.000.000	21.000.000	21.630.000	23.144.000	24.301.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengawasan arsip.	7.500.000	7.875.000	8.111.000	8.679.000	9.112.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan Perbup kearsipan.	30.000.000	31.500.000	32.445.000	34.716.000	36.451.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusun Perda kearsipan.	26.000.000	27.300.000	28.119.000	30.087.000	31.591.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan jadwal retensi arsip.	15.000.000	15.750.000	16.222.000	17.358.000	18.225.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	2.500.000	2.625.000	2.703.000	2.893.000	3.037.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

f. Smart Environment

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
Proteksi Lingkungan	Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana.	156.902.000	164.747.000	169.689.000	181.567.000	190.646.000	APBD	BPBD
	Program sistem layanan dan Karhutla.	235.000.000	246.750.000	254.152.000	271.943.000	285.540.000	APBD	BPBD
	Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik.	120.000.000	126.000.000	129.780.000	138.864.000	145.807.000	APBD	BPBD
	Program Desa tangguh bencana.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Posko dan relawan sosial.	5.358.127.000	5.626.033.000	5.794.814.000	6.200.451.000	6.510.473.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengembangan lingkungan berbasis <i>internet</i> .	34.000.000	35.700.000	36.771.000	39.344.070	41.312.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penertiban laporan dokumen lingkungan.	14.000.000	14.700.000	15.141.000	16.200.000	17.010.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengembangan RTH.	321.000.000	337.050.000	347.161.000	371.462.000	390.035.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Program pengembangan keanekaragaman hayati.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah organik.	34.000.000	35.700.000	36.771.000	39.344.000	41.312.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan hidup	25.000.000	26.250.000	27.037.000	28.930.000	30.376.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan masyarakat.	45.000.000	47.250.000	48.667.000	52.074.000	54.677.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana.	200.000.000	210.000.000	216.300.000	231.441.000	243.013.000	APBD	BPBD
	Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.	43.000.000	45.150.000	46.504.000	49.759.000	52.247.000	APBD	BPBD
	Program penanganan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>).	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	21.000.000	22.050.000	22.711.000	24.301.000	25.516.000	APBD	Dinas Lingkungan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
								Hidup
	Program pengelolaan sampah berkelanjutan.	10.000.000	10.500.000	10.815.000	11.572.000	12.150.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemilahan sampah rumah tangga.	21.000.000	22.050.000	22.711.000	24.301.000	25.516.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan capaian pengurangan sampah.	31.000.000	32.550.000	33.526.000	35.873.000	37.667.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan cakupan pelayanan sampah.	11.000.000	11.550.000	11.896.000	12.729.000	13.365.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.	50.000.000	52.500.000	54.075.000	57.860.000	60.753.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi bank sampah.	134.000.000	140.700.000	144.921.000	155.065.000	162.818.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemanfaatan gas metan di TPA.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah berbasis GPS.	110.000.000	115.500.000	118.965.000	127.292.000	133.657.000	APBD	Dinas Lingkungan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
								Hidup
	Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT3).	98.000.000	102.900.000	105.987.000	113.406.000	119.076.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Energi	Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan limbah kotoran hewan menjadi biogas di Desa Sungai Bahalang.	35.000.000	36.750.000	37.852.000	40.502.000	42.527.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik.	100.000.000	105.000.000	108.150.000	115.720.000	121.506.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan.	43.000.000	45.150.000	46.504.000	49.759.000	52.247.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.	121.000.000	127.050.000	130.861.000	140.021.000	147.022.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat.	12.000.000	12.600.000	12.978.000	13.886.000	14.580.000	APBD	Kecamatan Piani
	Program pendataan konsumsi listrik per kapita.	18.000.000	18.900.000	19.467.000	20.829.000	21.871.000	APBD	Kecamatan Bungur
	Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik.	16.600.000	17.430.000	17.952.000	19.209.000	20.170.000	APBD	Kecamatan Bungur

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Menengah					Sumber Dana	Leading Sector
		2023	2024	2025	2026	2027		
	Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.	123.000.000	129.150.000	133.024.000	142.336.000	149.453.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.	19.000.000	19.950.000	20.548.000	21.986.000	23.086.000	APBD	Kecamatan Piani
	Program peningkatan rumah tangga berakses listrik.	16.000.000	16.800.000	17.304.000	18.515.000	19.441.000	APBD	Kecamatan Piani

3. Pembangunan Jangka Panjang, Perencanaan pembangunan Smart City dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.

a. Smart Governance

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Pelayanan Publik	Program pelayanan penanaman modal/kegiatan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	DPMPSTP
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah/pengadaan barang milik daerah penunjang MPP.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DPMPSTP
	Program penataan administrasi kependudukan.	442.326.000	473.289.000	520.618.000	551.855.000	562.892.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								dan Pencatatan Sipil.
	Program pelayanan pencatatan sipil.	654.264.000	700.062.000	770.068.000	816.272.000	832.598.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.	222.654.000	238.239.000	262.063.000	277.787.000	283.343.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.	28.872.000	30.893.000	33.982.000	36.021.000	36.742.000	APBD / DAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	Pengembangan konektivitas antar wilayah sampai ke daerah pedalaman/terpencil.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan secara elektronik (<i>e - government</i>).	198.663.000	212.569.000	233.826.000	247.856.000	252.813.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan pusat data terpadu.	463.547.000	495.995.000	545.595.000	578.330.000	589.897.000	APBD	Dinas Komunikasi

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								dan Informatika
	Monitoring opini dan aspirasi publik.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan pengelolaan data statistik.	99.331.000	106.284.000	116.913.000	123.928.000	126.406.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan pelayanan kesekretariatan.	91.990.000	98.430.000	108.273.000	114.769.000	117.065.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik yang terintegrasi tentang produk hukum.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Pengembangan pelayanan kepada publik tentang informasi kegiatan DPRD.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan pelayanan kepada kinerja anggota DPRD optimalisasi kerja dan atau pelayanan publik.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyempurnaan aplikasi "SIMPEG" (Sapa-Tapin) sebagai penyaji data dan informasi kepegawaian.	9.535.000	10.203.000	11.223.000	11.897.000	12.135.000	APBD	BKPSDM
	Pembuatan aplikasi "Padaringan-Pegawai" (pelayanan	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	BKPSDM

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	dalam jaringan kepegawaian) untuk perbaikan kualitas pelayanan kepegawaian pada tahun 2022.							
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah (administrasi umum perangkat daerah dan pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah.	67.810.000	72.557.000	79.812.000	84.601.000	86.293.000	APBD	Bappelitbang
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	95.358.000	102.033.000	112.236.000	118.970.000	121.350.000	APBD	Bappelitbang
	Program penelitian dan pengembangan.	165.083.000	176.638.000	194.302.000	205.960.000	210.080.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pelayanan publik dan tata laksana.	14.568.000	15.588.000	17.147.000	18.176.000	18.539.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.	15.893.000	17.005.000	18.706.000	19.828.000	20.225.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	10.992.000	11.762.000	12.938.000	13.714.000	13.989.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan.	12.052.000	12.895.000	14.185.000	15.036.000	15.337.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	13.773.000	14.738.000	16.211.000	17.184.000	17.528.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	18.541.000	19.839.000	21.823.000	23.133.000	23.595.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan Kelurahan.	19.866.000	21.256.000	23.382.000	24.785.000	25.281.000	APBD	Kecamatan Tapin Selatan
Birokrasi Pemerintah	Program pengembangan iklim penanaman modal (Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten).	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	DPMPTSP
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah).	30.461.000	32.594.000	35.853.000	38.004.000	38.764.000	APBD	DPMPTSP
	Program penyelenggaraan pengawasan.	59.387.000	63.544.000	69.898.000	74.092.000	75.574.000	APBD	Inspektorat
	Kegiatan pengawasan internal.	59.387.000	63.544.000	69.898.000	74.092.000	75.574.000	APBD	Inspektorat
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	59.387.000	63.544.	69.898.000	74.092.000	75.574.000	APBD	Inspektorat
	Pengawasan, legislasi, dan <i>budgeter</i> .	709.026.000	758.658.000	834.523.000	884.595.000	902.287.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	312.166.000	334.017.000	367.419.000	389.464.000	397.253.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur baik aspek intelektual, administrasi, dan manajemen melalui	232.435.000	248.706.000	273.577.000	289.991.000	295.791.000	APBD	Sekretariat DPRD

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	kegiatan pelatihan-pelatihan, bimtek dan studi banding.							
	Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik interen maupun eksteren.	145.686.000	155.884.000	171.472.000	181.761.000	185.396.000	APBD	Sekretariat DPRD
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan.	68.075.000	72.840.000	80.124.000	84.932.000	86.630.000	APBD	Bappelitbang
	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.	69.532.000	74.399.000	81.839.000	86.749.000	88.484.000	APBD	Bappelitbang
	Peningkatan kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi.	726.284.000	777.124.000	854.837.000	906.127.000	924.249.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.	275.610.000	294.902.000	324.393.000	343.856.000	350.733.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	40.368.000	43.194.000	47.513.000	50.364.000	51.371.000	APBD	Kecamatan Tapin Utara
Kebijakan Publik	Program pelayanan penanaman modal.	556.256.000	595.194.000	654.714.000	693.997.000	707.877.000	APBD	DPMPSTSP
	Program promosi penanaman modal.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	DPMPSTSP
	Program peningkatan kepuasan terhadap pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.	19.866.000	21.256.000	23.382.000	24.785.000	25.281.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan terhadap aspirasi masyarakat	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	ABPD	Sekretariat DPRD

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	yang dapat terakomodir.							
	Program penyelarasan pokok pikiran DPRD dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten.	957.450.000	1.024.472.000	1.126.919.000	1.194.534.000	1.218.425.000	ABPD	Sekretariat DPRD
	Program penelitian dan pengembangan.	508.577.000	544.178.000	598.595.000	634.511.000	647.201.000	APBD	Bappelitbang
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	75.492.000	80.776.000	88.854.000	94.185.000	96.069.000	APBD	Bappelitbang

b. Smart Branding

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Pariwisata	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kawasan wisata daerah	62.910.000	67.313.000	74.045.000	78.487.000	80.057.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Pembuatan media sosial.	13.244.000	14.171.000	15.588.000	16.523.000	16.854.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi promosi pariwisata berbasis <i>website</i> .	13.244.000	14.171.000	15.588.000	16.523.000	16.854.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								Pariwisata
	Pembentukan tim kreatif promosi pariwisata.	165.552.000	177.141.000	194.855.000	206.546.000	210.677.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan konten <i>video</i> untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan konten gambar untuk disebarluaskan melalui media <i>digital</i> .	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program <i>updating website</i> instansi dinas.	46.354.000	49.599.000	54.559.000	57.833.000	58.989.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan dokumen kajian ekonomi kreatif.	92.709.000	99.199.000	109.119.000	115.666.000	117.979.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pembuatan aplikasi pemesanan <i>online</i> Plaza kuliner.	52.976.000	56.685.000	62.353.000	66.094.000	67.416.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Pembuatan aplikasi pemesanan tiket <i>online</i> untuk DTW unggulan, objek cagar budaya dan <i>event</i> .	52.976.000	56.685.000	62.353.000	66.094.000	67.416.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pendataan dan penyajian data objek pemajuan kebudayaan daerah.	63.572.000	68.022.000	74.824.000	79.313.000	80.900.000	PAD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kemudahan Pelaksanaan Bisnis	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.	18.541.000	19.839.000	21.823.000	23.133.000	23.595.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.	11.919.000	12.754.000	14.029.000	14.871.000	15.168.000	APBD	Kecamatan Bakarangan
	Program kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bakarangan.	14.568.000	15.588.000	17.147.000	18.176.000	18.539.000	APBD	Kecamatan Tapin Tengah
	Pembinaan dan pendampingan IKM mebel ke Pulau Jawa.	22.515.000	24.091.000	26.500.000	28.090.000	28.652.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembinaan dan pendampingan IKM produk anyaman ke Pulau Jawa.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Sewa <i>hosting website</i> Sipikat.	13.244.000	14.171.000	15.588.000	16.523.000	16.854.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis dan manajemen industri.	58.274.000	62.353.000	68.589.000	72.704.000	74.158.000	APBD	Dinas Perindustrian

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai.	39.070.000	41.805.000	45.985.000	48.745.000	49.719.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Kerjasama dengan <i>unicorn</i> besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah.	33.905.000	36.278.000	39.906.000	42.300.000	43.146.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/ <i>Bank</i> .	20.528.000	21.965.000	24.162.000	25.611.000	26.124.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan studi kajian peluang investasi industri.	39.997.000	42.797.000	47.077.000	49.901.000	50.899.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pembangunan dan pemasaran produk dan jasa industri kreatif daerah di Bendungan Tapin dan lokasi <i>rest area</i> .	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Inventarisasi data IKM.	41.321.000	44.214.000	48.635.000	51.554.000	52.585.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan peruntukan industri.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Program penggunaan produk lokal.	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	Dinas Perindustrian
	Pelatihan kemasan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga).	43.043.000	46.056.000	50.662.000	53.702.000	54.776.000	APBD	Dinas Perindustrian
Wajah Kota	Pembangunan jalan pedestrian untuk menunjang pariwisata Rantau baru.	6.622.105.000	7.085.653.000	7.794.218.000	8.261.871.000	8.427.108.000	APBD	Dinas Penataan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan lintasan khusus jalur sepeda di wilayah Kota Rantau.	6.622.105.000	7.085.653.000	7.794.218.000	8.261.871.000	8.427.108.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan bundaran Tugu Adipura.	2.648.842.000	2.834.261.000	3.117.687.000	3.304.748.000	3.370.843.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Pembuatan aplikasi <i>Virtual Tour</i> .	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Penataan Umum dan Penataan Ruang
	Program ketersediaan sistem informasi ruang publik.	476.791.000	510.167.000	561.183.000	594.854.000	606.751.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pembuatan alat informasi suhu dan kualitas udara di ruang publik.	662.210.000	708.565.000	779.421.000	826.187.000	842.710.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								Ruang
	Program pembuatan aplikasi <i>Tour Guide</i> lokasi pemancingan berbasis GIS.	357.593.000	382.625.000	420.887.000	446.141.000	455.063.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program pengembangan <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS)	1.324.421.000	1.417.130.000	1.558.843.000	1.652.374.000	1.685.421.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program penghijauan Kota.	145.686.000	155.884.000	171.472.000	181.761.000	185.396.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Program <i>landmark</i> khas Tapin.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

c. *Smart Economy*

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Industri Berdaya Saing	Program peningkatan produksi dan produk olahan Cabai Hiyung.	59.598.000	63.770.000	70.147.000	74.356.000	75.843.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan pembudidayaan ikan.	662.210.000	708.565.000	779.421.000	826.187.000	842.710.000	PAD	Dinas Perikanan
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	PAD	Dinas Perikanan
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	PAD	Dinas Perikanan
	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda)	Sekretariat Daerah
	Pengembangan layanan air minum secara <i>digital</i> .	42.381.000	45.348.000	49.882.000	52.875.000	53.933.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program penunjang kegiatan fasilitasi kunjungan tamu.	26.170.000	28.002.000	30.802.000	32.650.000	33.303.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat
	Menambah unit Bumdes setiap Desa dan UMKM lainnya.	20.660.000	22.107.000	24.317.000	25.777.000	26.292.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Selatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota.	28.475.000	30.468.000	33.515.000	35.526.000	36.236.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan.	70.989.000	75.958.000	83.554.000	88.567.000	90.338.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota.	1.330.227.000	1.423.343.000	1.565.677.000	1.659.618.000	1.692.810.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.	35.627.000	38.120.000	41.933.000	44.449.000	45.338.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	2.648.842.000	2.834.261.000	3.117.687.000	3.304.748.000	3.370.843.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	274.631.000	293.856.000	323.241.000	342.636.000	349.489.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	349.647.000	374.122.000	411.534.000	436.226.000	444.951.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.	114.429.000	122.440.000	134.684.000	142.765.000	145.620.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten Tapin.	317.861.000	340.111.000	374.122.000	396.569.000	404.501.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Pertanian
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun.	182.084.000	194.830.000	214.313.000	227.172.000	231.715.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.	120.588.000	129.029.000	141.932.000	150.448.000	153.457.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Program penyuluhan pertanian.	30.461.000	32.594.000	35.853.000	38.004.000	38.764.000	APBD	Dinas Pertanian
	Program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Bursa kerja <i>online</i> .	23.078.000	24.693.000	27.162.000	28.792.000	29.368.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Pelatihan teknologi tepat guna.	662.210.000	708.565.000	779.421.000	826.187.000	842.710.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja LLK Tapin.	34.170.000	36.561.000	40.218.000	42.631.000	43.483.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tenaga kerja.	62.247.000	66.605.000	73.265.000	77.661.000	79.214.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
	Program grebek pasar.	19.866.000	21.256.000	23.382.000	24.785.000	25.281.000	APBD	Kecamatan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								Candi Laras Selatan
	Program pelatihan untuk masyarakat dalam meningkatkan <i>skill</i> /keterampilan.	38.937.000	41.663.000	45.830.000	48.579.000	49.551.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja
Transaksi Keuangan	Pelayanan pemberian rekomendasi perizinan secara elektronik.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pemenuhan ekonomi digital dengan mendorong industri <i>e-commerce</i> dan <i>marketplace</i> .	92.709.000	99.199.000	109.119.000	115.666.000	117.979.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi <i>database</i> pasar.	158.930.000	170.055.000	187.061.000	198.284.000	202.250.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pengembangan pembayaran retribusi secara elektronik.	39.732.000	42.513.000	46.765.000	49.571.000	50.562.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang <i>modern</i> .	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.	22.515.000	24.091.000	26.500.000	28.090.000	28.652.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan aplikasi informasi harga barang pokok dan penting.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Pembuatan Sistem Informasi manajemen pelaporan tera dan tera ulang serta pengawasan metrologi <i>legal</i> .	280.343.000	299.967.000	329.964.000	349.761.000	356.757.000	APBD	Dinas Perdagangan
	Program pengelolaan keuangan daerah.	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	Badan Keuangan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
								dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah.	30.461.000	32.594.000	35.853.000	38.004.000	38.764.000	APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Pengembangan aplikasi pendapatan daerah.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah
	Program pelayanan pajak dan retribusi daerah.	295.345.000	316.020.000	347.622.000	368.479.000	375.849.000	APBD	Badan Pendapatan Daerah
	Pengembangan <i>Digital Banking</i> BPR.	331.105.000	354.282.000	389.710.000	413.093.000	421.355.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Program pengembangan <i>marketplace</i> .	15.893.000	17.005.000	18.706.000	19.828.000	20.225.000	APBD	Kecamatan Lokpaikat

d. Smart Living

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Normalisasi Tata Ruang	Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan media sosial.	237.314.000	253.926.000	279.319.000	296.078.000	302.000.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan pelaku usaha di Kecamatan.	17.344.000	18.558.000	20.414.000	21.639.000	22.071.000	APBD	Kecamatan Salam Babaris
	Program fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.	624.464.000	668.177.000	734.994.000	779.094.000	794.676.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan.	79.465.000	85.027.000	93.530.000	99.142.000	101.125.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat berupa bantuan stimulan rumah tidak layak huni.	165.552.000	177.141.000	194.855.000	206.546.000	210.677.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan	104.629.000	111.953.000	123.148.000	130.537.000	133.148.000	APBD	Dinas

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	prasarana perumahan dan permukiman.							Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Perbaiki prasarana, sarana dan <i>utilitas</i> umum di lingkungan perumahan dan permukiman.	258.659.000	276.765.000	304.442.000	322.708.000	329.162.000	APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sarana Prasarana Kesehatan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.759.546.000	1.882.714.000	2.070.986.000	2.195.245.000	2.239.150.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<i>Public Safety Center (PSC) 119.</i>	331.105.000	354.282.000	389.710.000	413.093.000	421.355.000	APBD, DAK	Dinas Kesehatan
	Digitalisasi pelayanan.	463.547.000	495.995.000	545.595.000	578.330.000	589.897.000	BLUD	RSUD Datu Sanggul
	Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas layanan pengadaan barang/jasa.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	Sekretariat Daerah
	Mengadakan vaksinasi <i>massal</i> di setiap Desa	12.582.000	13.462.000	14.809.000	15.697.000	16.011.000	APBD	Kecamatan Candi Laras Utara
Sarana Prasarana Transportasi	Program penataan ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik,	1.324.421.000	1.417.130.000	1.558.843.000	1.652.374.000	1.685.421.000	APBD	Dinas Perhubungan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	pembangunan/pengadaan fasilitas penunjang pelabuhan dan dermaga, serta pengadaan angkutan khusus untuk pelajar/siswa.							
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas <i>Area Traffic Control System (ATCS)</i> atau yang lebih dikenal dengan istilah atcs adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.	1.324.421.000	1.417.130.000	1.558.843.000	1.652.374.000	1.685.421.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan fasilitas lampu lalu lintas cerdas (pembangunan/pengadaan fasilitas rambu-rambu, <i>traffic/warning light zoss</i> dan marka jalan dengan teknologi terbaru).	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	Dinas Perhubungan
	Program pembangunan/pengadaan untuk gedung pengujian kendaraan bermotor dengan fasilitas <i>smartcard</i> atau bukti lulus uji elektronik (<i>blue</i>).	2.648.842.000	2.834.261.000	3.117.687.000	3.304.748.000	3.370.843.000	APBD	Dinas Perhubungan

e. Smart Society

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Interaksi Masyarakat	Program perlindungan dan jaminan sosial.	8.336.199.000	8.919.733.000	9.811.706.000	10.400.408.000	10.608.417.000	APBD	Dinas Sosial

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
yang Efisien	Program rehabilitasi sosial.					0	APBD	Dinsos
	Program pemberdayaan sosial.	1.727.237.000	1.848.143.000	2.032.958.000	2.154.935.000	2.198.034.000	APBD	Dinsos
	Program peningkatan persentase PKK aktif.	1.663.472.000	1.779.916.000	1.957.907.000	2.075.382.000	2.116.889.000	APBD	DPMD
	Program peningkatan persentase Posyandu aktif.						APBD	DPMD
	Program peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.	1.693.934.000	1.812.510.000	1.993.761.000	2.113.386.000	2.155.654.000	APBD	DPMD
	Program pembangunan dan pengembangan ekonomi pedesaan.	328.456.000	351.448.000	386.593.000	409.788.000	417.984.000	APBD	DPMD
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	1.855.513.000	1.985.399.000	2.183.939.000	2.314.976.000	2.361.275.000	APBD	DPPKB
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah.	64.896.000	69.439.000	76.383.000	80.966.000	82.585.000	APBD	DPPKB
	Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.	2.137.615.	2.287.248.000	2.515.973.000	2.666.932.000	2.720.270.000	APBD	DPPKB
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah.	1.282.039.000	1.371.782.000	1.508.960.000	1.599.498.000	1.631.488.000	APBD	DPPKB
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Provinsi dengan	488.711.000	522.921.000	575.213.000	609.726.000	621.920.000	APBD	DPPKB

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Pemerintah Daerah.							
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah.	307.265.700	328.774.000	361.651.000	383.350.000	391.017.000	APBD	DPPKB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.	46.319.000	49.561.000	54.517.000	57.788.000	58.944.000	APBD	DP3A
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah.	81.753.000	87.476.000	96.223.000	101.997.000	104.037.000	APBD	DP3A
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan <i>Gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	73.462.000	78.604.000	86.464.000	91.652.000	93.485.000	APBD	DP3A
	Kegiatan kerjasama dengan kementerian agama, pengadilan agama dan dinas pendidikan.	32.236.000	34.492.000	37.942.000	40.218.000	41.023.000	APBD	Disdik
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan <i>Gender</i> (KG) dan hak anak tingkat daerah.	175.326.000	187.599.000	206.359.000	218.741.000	223.115.000	APBD	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan <i>gender</i> dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.	162.973.000	174.382.000	191.820.000	203.329.000	207.396.000	APBD	DP3A
	Peningkatan pelayanan dan informasi (otomasi perpustakaan, perpustakaan <i>digital</i> ,	331.105.000	354.282.000	389.710.000	413.093.000	421.355.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	layanan ekstensi, pelatihan ke masyarakat untuk inklusi sosial).							Kearsipan
	Pameran dan promosi (pameran, <i>website</i>).	198.663.000	212.569.000	233.826.000	247.856.000	252.813.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Gerakan minat dan budaya baca (aneka lomba, sosialisasi perpustakaan).	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Rencana pembuatan aplikasi <i>web</i> Kesbangpol.	13.244.000	14.171.000	15.588.000	16.523.000	16.854.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>).	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah Kecamatan.	39.732.000	42.513.000	46.765.000	49.571.000	50.562.000	APBD	Kecamatan Binuang
Ekosistem Belajar	Melaksanakan rapat gugus tugas KLA.	31.107.000	33.285.000	36.613.000	38.810.000	39.587.000	APBD	DP3A
	Program pemenuhan hak anak.	8.947.000	9.573.000	10.530.000	11.162.000	11.385.000	APBD	DP3A
	Penyediaan bahan Perpustakaan (Tersedianya <i>database</i> bahan Perpustakaan).	44.142.000	47.232.000	51.956.000	55.073.000	56.175.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pembinaan dan pengembangan Pustakawan dan Perpustakaan (Pendataan Perpustakaan)	56.950.000	60.936.000	67.030.000	71.052.000	72.473.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	dan Pustakawan).							Kearsipan
	Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.	59.598.000	63.770.000	70.147.000	74.356.000	75.843.000	APBD	Kecamatan Hatungan
	Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.	31.786.000	34.011.000	37.412.000	39.656.000	40.450.000	APBD	Kecamatan Hatungan
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	Koordinasi kampung siaga bencana.	22.126.000	23.675.000	26.042.000	27.605.000	28.157.000	APBD	Dinas Sosial
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota.	482.992.000	516.802.000	568.482.000	602.591.000	614.643.000	APBD	DP3A
	Program perlindungan hak perempuan.						APBD	DP3A
	Asistensi pendampingan dan advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.	193.365.000	206.901.000	227.591.000	241.246.000	246.071.000	APBD	DP3A
	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	5.297.000	5.668.000	6.235.000	6.609.000	6.741.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Bimbingan teknis kearsipan.	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip Daerah.	19.866.000	21.256.000	23.382.000	24.785.000	25.281.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Sosialisasi kearsipan.	27.812.000	29.759.000	32.735.000	34.699.000	35.393.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pemeliharaan rutin arsip Daerah.	26.488.000	28.342.000	31.176.000	33.047.000	33.708.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengawasan arsip.	9.933.000	10.628.000	11.691.000	12.392.000	12.640.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan Perbup kearsipan.	39.732.000	42.513.000	46.765.000	49.571.000	50.562.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusun Perda kearsipan.	34.434.000	36.845.000	40.529.000	42.961.000	43.820.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyusunan jadwal retensi arsip.	19.866.000	21.256.000	23.382.000	24.785.000	25.281.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	3.311.000	3.542.000	3.897.000	4.130.000	4.213.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

f. Smart Environment

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
Proteksi Lingkungan	Program sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kesiapsiagaan serta tanggap terhadap bencana.	207.804.000	222.350.000	244.585.000	259.260.000	264.446.000	APBD	BPBD
	Program sistem layanan dan Karhutla.	311.238.000	333.025.000	366.328.000	388.307.000	396.074.000	APBD	BPBD
	Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui kajian dan penataan lingkungan yang baik.	158.930.000	170.055.000	187.061.000	198.284.000	202.250.000	APBD	BPBD
	Program Desa tangguh bencana.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH
	Program Posko dan relawan sosial.	7.096.416.000	7.593.165.000	8.352.482.000	8.853.631.000	9.030.703.000	APBD	DLH
	Program pengembangan lingkungan berbasis <i>internet</i> .	45.030.000	48.182.000	53.000.000	56.180.000	57.304.000	APBD	DLH
	Program penertiban laporan dokumen lingkungan.	18.541.000	19.839.000	21.823.000	23.133.000	23.595.000	APBD	DLH
	Program pengembangan RTH.	425.139.000	454.898.000	500.388.000	530.412.000	541.020.000	APBD	DLH
	Program pengembangan keanekaragaman hayati.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH
	Program pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah organik.	45.030.000	48.182.000	53.000.000	56.180.000	57.304.000	APBD	DLH
	Program peningkatan layanan laboratorium lingkungan.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Program peningkatan peran sekolah dalam lingkungan hidup	33.110.000	35.428.000	38.971.000	41.309.000	42.135.000	APBD	DLH
	Program pengendalian pengelolaan lingkungan melalui Pos pengaduan masyarakat.	59.598.000	63.770.000	70.147.000	74.356.000	75.843.000	APBD	DLH
	Program peningkatan infrastruktur dan sarana penanggulangan bencana.	264.884.000	283.426.000	311.768.000	330.474.000	337.084.000	APBD	BPBD
	Program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.	56.950.000	60.936.000	67.030.000	71.052.000	72.473.000	APBD	BPBD
	Program penanganan sampah dengan metode 3R (<i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>).	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	27.812.000	29.759.000	32.735.000	34.699.000	35.393.000	APBD	DLH
	Program pengelolaan sampah berkelanjutan.	13.244.000	14.171.000	15.588.000	16.523.000	16.854.000	APBD	DLH
	Program pemilahan sampah rumah tangga.	27.812.000	29.759.000	32.735.000	34.699.000	35.393.000	APBD	DLH
	Program peningkatan capaian pengurangan sampah.	41.057.000	43.931.000	48.324.000	51.223.000	52.248.000	APBD	DLH
	Program peningkatan cakupan pelayanan sampah.	14.568.000	15.588.000	17.147.000	18.176.000	18.539.000	APBD	DLH
	Program pengelolaan sampah rumah tangga, industri dan publik berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat.	66.221.000	70.856.000	77.942.000	82.618.000	84.271.000	APBD	DLH

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Program peningkatan dan pengembangan sistem informasi bank sampah.	177.472.000	189.895.000	208.885.000	221.418.000	225.846.000	APBD	DLH
	Program pemanfaatan gas metan di TPA.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH
	Program monitoring mobilisasi pengangkutan sampah berbasis GPS.	145.686.000	155.884.000	171.472.000	181.761.000	185.396.000	APBD	DLH
	Program peningkatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLT3).	129.793.000	138.878.000	152.766.000	161.932.000	165.171.000	APBD	DLH
Tata Kelola Energi	Program pembinaan pada masyarakat untuk pemanfaatan limbah kotoran hewan menjadi biogas di Desa Sungai Bahalang.	46.354.000	49.599.000	54.559.000	57.833.000	58.989.000	APBD	DLH
	Program peningkatan teknologi pengolahan sampah plastik.	132.442.000	141.713.000	155.884.000	165.237.000	168.542.000	APBD	DLH
	Program penelitian dan pengembangan energi terbarukan.	56.950.000	60.936.000	67.030.000	71.052.000	72.473.000	APBD	DLH
	Pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan.	160.254.000	171.472.000	188.620.000	199.937.000	203.936.000	APBD	DLH
	Program pemenuhan energi listrik bagi masyarakat.	15.893.000	17.005.000	18.706.000	19.828.000	20.225.000	APBD	Kec. Piani
	Program pendataan konsumsi listrik per kapita.	23.839.000	25.508.000	28.059.000	29.742.000	30.337.000	APBD	Kec. Bungur
	Program peningkatan capaian rasio ketersediaan listrik.	21.985.000	23.524.000	25.876.000	27.429.000	27.978.000	APBD	Kec. Bungur

Sub Dimensi	Program (Kegiatan)	Jangka Panjang					Sumber Dana	Leading Sector
		2028	2029	2030	2031	2032		
	Program pengawasan dan pengendalian energi, geologi, air tanah dan pertambangan.	162.903.000	174.307.000	191.737.000	203.242.000	207.306.000	APBD	DLH
	Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan.	25.164.000	26.925.000	29.618.000	31.395.000	32.023.000	APBD	Kec. Piani
	Program peningkatan rumah tangga berakses listrik.	21.190.000	22.674.000	24.941.000	26.437.000	26.966.000	APBD	Kec. Piani

6. Penutup

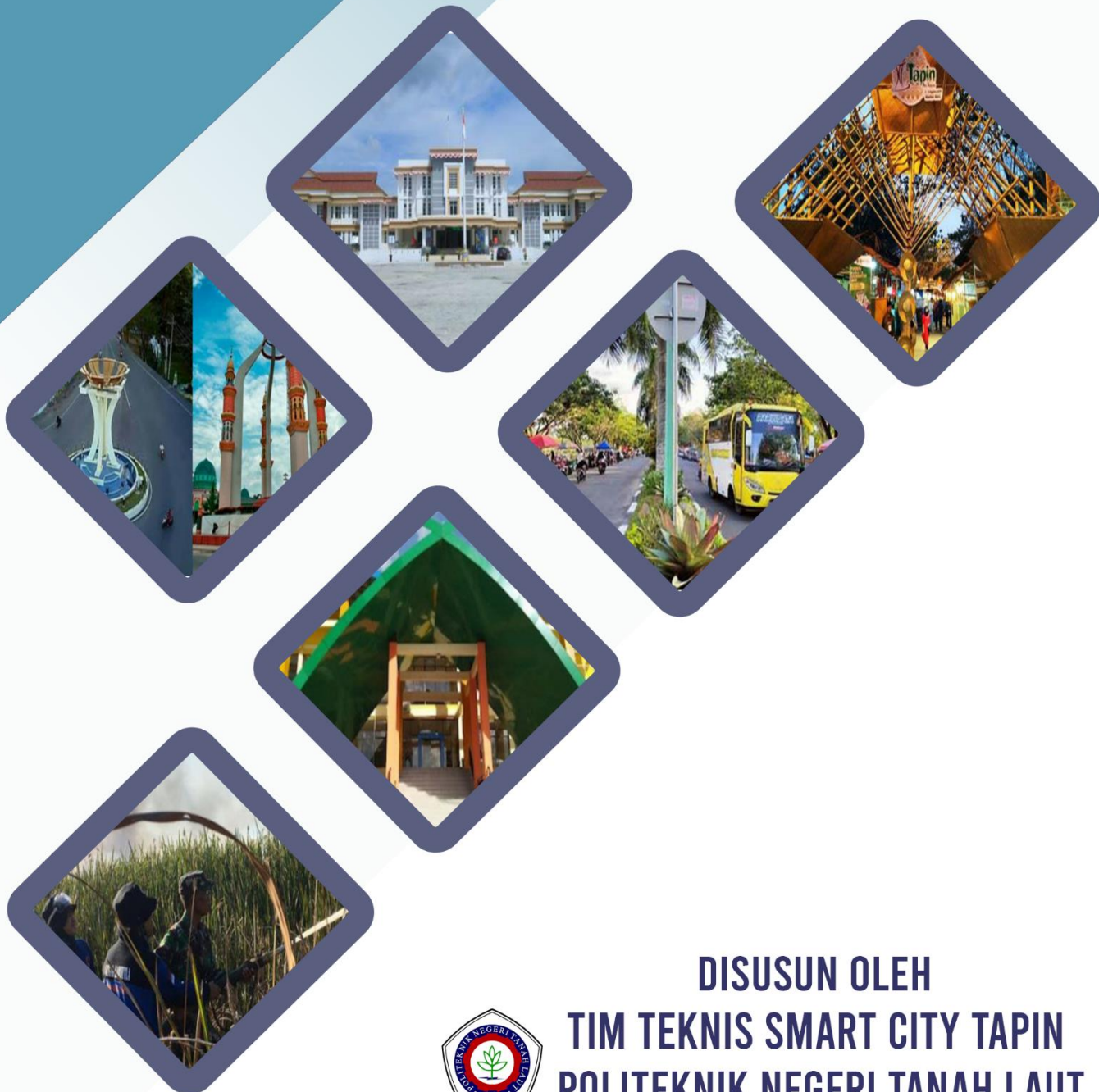
Kabupaten Tapin telah mulai melakukan persiapan *Smart City* yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo guna melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep *Smart City* atau Daerah Pintar. Dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin, baik itu dari segi infrastruktur serta Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah Kota Kabupaten Tapin dan Tim *Smart City* telah mengembangkan visi, strategi dan prioritas menuju Kabupaten Tapin *Smart City*. Pembangunan prioritas Kabupaten Tapin *Smart City* meliputi enam dimensi, yaitu tata kelola pemerintahan (*governance*), penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah (*branding*), tata kelola perekonomian (*economy*), peningkatan kelayakan taraf hidup masyarakat (*living*), ekosistem sosial masyarakat (*social*), serta pengelolaan lingkungan (*environment*). Besar harapan, segala inovasi yang dirancang akan menjadi solusi yang signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga pemerintah dapat memberikan layanan kepada publik dengan menyediakan lingkungan tempat tinggal yang berkelanjutan, layak serta meningkatkan daya saing daerah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Tapin *Smart City*, pemerintah Kabupaten Tapin tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan integrasi dan kolaborasi antar sektor, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta. Diperlukan penyesuaian persepsi dan sinkronisasi untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian pengembangan *Smart City* dapat menjadi efektif, efisien, inklusif dan partisipatif. Berbagai akselerasi pembangunan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Tapin sesuai dengan visi *Smart City* Kabupaten Tapin, yaitu Menjadi Kabupaten TAMPAN, TApin Maju, Profesional, Adaptif dan iNovatif.

Proses pembangunan menuju Kabupaten Tapin *Smart City* masih sangat panjang. Kepala Daerah, Dewan *Smart City* dan Tim Teknis berkomitmen untuk mewujudkan *Master Plan Smart City* dalam implementasi, maupun monitoring dan evaluasi sehingga akan berjalan dengan sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu dan bertahap, maka dalam pengembangannya akan secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi setiap tahun terhadap rancangan yang telah dibuat dan perubahan tersebut yang akan dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin.



SMART CITY KABUPATEN TAPIN



DISUSUN OLEH
TIM TEKNIS SMART CITY TAPIN
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

